

**TAHUN
2021**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Jl. R.M. Nur Atmadibrata No.01 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 669352 Fax (0741) 669352 Website : www.litbang.jambi.prov.go.id

Email : balitbangdajambi1@gmail.com: balitbangdajbiup@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian LKjIP Tahun 2021 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi,

2021



Kepala Badan,

Ir. AZRIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660224 199203 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkJP) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Revisi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder* memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.117.675.749,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.072.235.521,- (95,93%). Capaian kinerja Tahun 2021 100% dari 50% yang ditargetkan.
2. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan SIDA dan Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan *Stakeholder* dengan anggaran Rp. 428.753.470,- dengan realisasi sebesar Rp. 400.743.810,- (96,47%). Capaian kinerja Tahun 2021 200% (2 Komoditi) dari 100% (1 komoditi) yang ditargetkan serta 79% dari 75% yang ditargetkan.
3. Indikator Kinerja *Science Park* yang dikembangkan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- . Target kinerja tercapai 100% dengan telah adanya Kawasan *Science Park* di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi walaupun belum ada pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang disebabkan keterbatasan anggaran.
4. Indikator Kinerja Persentase hasil publikasi Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 399.947.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 369.618.400,- (92,42%). Capaian kinerja Tahun 2020 100% dari 100% yang ditargetkan.
5. Indikator Kinerja Nilai AKIP dan IKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.613.998.855,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.548.463.152,- (95,943%). Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Nilai AKIP 70,18 dari 62 yang ditargetkan dan IKM 82,639 dari 80 yang ditergetkan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Balitbangda Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan.
2. Memonitor pencapaian target jangka menengah dalam Renstra sampai tahun berjalan.

3. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
4. Melakukan penyempurnaan dalam penyajian informasi LkjIP dalam hal penyajian informasi tentang analisis efesiensi penggunaan sumber daya
5. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam LKjIP ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Balitbangaa Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	1
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu-Isu Strategis.....	14
1.4 Keadaan Pegawai.....	14
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	16
1.6 Keuangan	17
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Perencanaan Strategis.....	19
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	19
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	25
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan.....	27
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	30
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021.....	30
2.3.1 Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi.....	31
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	31
2.4 Instrumen Pendukung.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	33
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	34
3.3. Realisasi Anggaran.....	44
3.4. Analisis Efisiensi.....	52
BABIV PENUTUP.....	53
LAMPIRAN	55
Lampiran 1 Perjanjian KinerjaTahun 2021	
Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbangda Provinsi Jambi	
Lampiran 3 Prestasi yang diraih Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	
Lampiran 4 Matriks Renstra 2016-2021	
Lampiran 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomorm002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021	
Lampiran 6 Laporan Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indek Daya Saing Daerah Tahun 2021	
Lampiran 7 Hasil-hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021	15
Tabel 1.2.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021.....	15
Tabel 1.3.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021	15
Tabel 1.4.	Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021.....	16
Tabel 1.5.	Daftar Sarana dan Prasarana Badan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	16
Tabel 2.1.	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021.....	21
Tabel 2.2.	Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	26
Tabel 2.3.	Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi.	17
Tabel 2.4.	Perjanjian KinerjaTahun 2021	30
Tabel 2.5.	Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2021	31
Tabel 2.6.	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Balitbangda Provinsi Jambi	31
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	34
Tabel 3.3.	Indikator Kinerja Utama Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	35
Tabel 3.4.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	38
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja 2019-2021	38
Tabel 3.6.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	39
Tabel 3.7.	Capaian Kinerja 2019-2021	40
Tabel 3.8.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	40
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja 2019-2021	41
Tabel 3.10.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	42
Tabel 3.11.	Capaian Kinerja 2019-2021	42
Tabel 3.12.	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021	43
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja 2019-2021	44
Tabel 3.14.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	48
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021.....	51
Tabel 3.16.	Analisis Efisiensi Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021	52

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi 2

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Fungsi dan Tujuan
- 1.3. Isu-isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup

Pemerintah Provinsi Jambi.

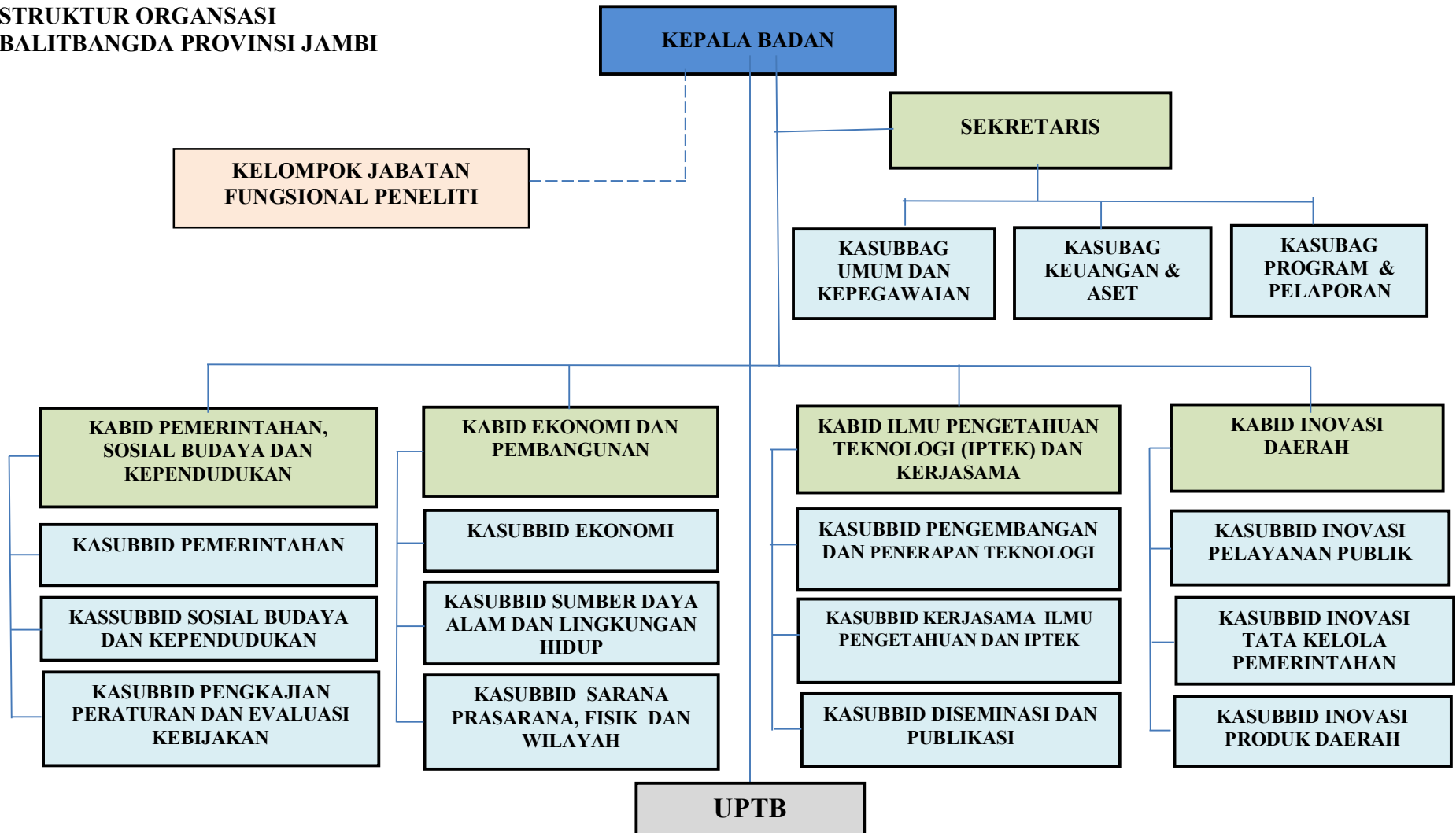
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balitbangda Provinsi Jambi;
2. Mendorong Balitbangda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balitbangda Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Balitbangda Provinsi Jambi dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

Balitbangda Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANSASI
BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2021 menggunakan struktur Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021.

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, menetapkan bahwa Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping tugas yang diemban tersebut Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 2) Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- 4) Pembinaan dan fasilitasi penelitian dan pengembangan kepada perangkat daerah pelaksana kelitbang kab/kota;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;
- 6) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- 7) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada badan;
- 8) Pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;
- 9) Permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
- 10) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sedangkan tugas dan fungsi masing masing jabatan eselon III pada Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan rencana program dan anggaran kelitbang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan

perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran kelitbangan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja kelitbangan;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumatanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset serta dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi dan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
 - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga, humas dan keprotokolan;
 - penyiapan pelaksanaan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - penyiapan bahan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan dokumentasi dan informasi umum dan kepegawaian; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, pengelolaan aset, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan dan aset;
 - pengumpulan data dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran keuangan dan aset;
 - penyiapan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - pelaksanaan verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
 - penyusunan laporan keuangan dan aset;

- pelaksanaan pemeliharaan aset; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
- Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan data bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- pengumpulan bahan dokumen perencanaan dan anggaran meliputi rencana strategis dan rencana kerja badan dan dokumen perencanaan lainnya;
 - pengumpulan bahan dan penyiapan rencana kerja dan anggaran (RKA) badan;
 - penyiapan bahan koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelitbangan;
 - pengelolaan sistem informasi pelaporan pelaksanaan program kelitbangan di lingkungan badan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL BUDAYA DAN KEPENDUDUKAN

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai tugas membantu Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi, konfirmasi, konsultasi di bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan sosial budaya dan kependudukan;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di bidang pemerintahan, sosial budaya dan kependudukan;
- e. penyiapan bahan rekomendasi hasil kelitbangan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha di bidang , sosial budaya dan kependudukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kependudukan terdiri dari :

- Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di subbidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang sosial budaya dan kependudukan, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, masyarakat terpencil, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang pemerintahan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang pemerintahan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan evaluasi kebijakan dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan mempunyai fungsi :

- pengumpulan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kelitbangan sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan;
- penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir kelitbangan di sub bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, koordinasi, konsultasi dan evaluasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengaturan untuk penyiapan bahan kebijakan teknis, program dan anggaran kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- b. pengaturan pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- c. pelaksanaan evaluasi kegiatan kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. pelaksanaan penyeliaan penyusunan rekomendasi hasil kelitbangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan penyeliaan administrasi dan tata usaha di Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai kewenangannya.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :

- Sub Bidang Ekonomi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Subbidang Ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, keuangan daerah, pariwisata dan ekonomi kreatif, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik daerah. Untuk melaksanakan tugas, Subbidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di sub bidang Ekonomi;

- pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di Subbidang Ekonomi;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Ekonomi;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Ekonomi ; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan dan penguatan kelembagaan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi aspek-aspek ketahanan pangan, pertanian, perikanan dan kelautan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan dan bencana alam. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- Mengumpul/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi, serta konsultasi di Penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - penyiapan data dan bahan serta fasilitasi kegiatan penguatan kelembagaan Sumber Daya Genetik;
 - membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - melakukan tugas lain yang diberikan atasan.
- Sub Bidang Sarana Prasarana, Fisik dan Wilayah, mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan, evaluasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan, koordinasi, konsultasi dan perumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di Subbidang sarana prasarana fisik dan wilayah, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan

permukiman, penataan ruang dan pertanahan, kelistrikan, komunikasi/informatika. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah mempunyai fungsi :

- mengumpulkan/mengolah data dan bahan perumusan kebijakan teknis, laporan, koordinasi serta konsultasi di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- pelaksanaan/fasilitasi kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- penyiapan rumusan rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah;
- membimbing bawahan dalam pelaksanaan administrasi dan tata usaha di sub bidang Sarana Prasarana Fisik dan Wilayah; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI (IPTEK) DAN KERJASAMA

Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka mengatur pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang meliputi penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi (Iptek) dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan data dan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kelitbangan, yang meliputi pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian di bidang Iptek dan kerjasama
- c. penyiapan bahan, fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang Iptek dan kerjasama;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian/pengkajian, rekayasa di bidang iptek dan kerjasama;
- e. pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Bidang Iptek dan Kerjasama terdiri dari :

- Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan di bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas, sub bidang Pengembangan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penerapan teknologi;
 - penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan serta penerapan teknologi, meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pembinaan dan pelaksanaan kelitbangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi; aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan fasilitas di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di subbidang pengembangan dan penerapan teknologi meliputi aspek-aspek pengembangan, penerapan dan perekayasaan teknologi;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Kerjasama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,fasilitasi, evaluasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta pelaksanaan kerjasama kelitbangan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Kerjasama mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - pembinaan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang kerjasama meliputi semua aspek kelitbangan;

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.
- Sub bidang Diseminasi dan Publikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan-bahan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi, dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Diseminasi dan Publikasi mempunyai fungsi :
 - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang Diseminasi dan publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pemfasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - pelaksanaan sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi ;
 - pelaksanaan pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitas di bidang Diseminasi dan Publikasi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan;
 - penyiapan bahan-bahan laporan dan perumusan hasil akhir penelitian dan pengembangan di bidang Diseminasi dan Publikasi meliputi aspek-aspek sosialisasi, promosi iptek, diseminasi dan publikasi hasil kelitbangan berbasis Teknologi Informasi serta pengelolaan jurnal dan perpustakaan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BIDANG INOVASI DAERAH

Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Pengembangan Inovasi Daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, strategi dan penerapan pengembangan memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;

- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersilat inovatif;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Inovasi Daerah terdiri dari :

- Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Pelayanan Publik mempunyai fungsi :
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Pelayanan Publik; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur, dan metode tata kelola pemerintahan daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Tata Kelola Pemerintahan;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;

- menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Tata Kelola Pemerintahan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Sub Bidang Inovasi Produk Daerah, mempunyai tugas bahan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah meliputi jenis, prosedur dan metode pengembangan Produk Daerah yang bersifat inovatif. Untuk melaksanakan tugas sub bidang Inovasi Produk Daerah mempunyai fungsi :
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - memfasilitasi serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
 - menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode pengembangan produk daerah yang bersifat Inovatif; pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di SubBidang Inovasi Produk Daerah;
 - melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan kelitbangan daerah di Sub Bidang Inovasi Produk Daerah;
 - menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inovasi Produk Daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Bidang.

Balitbangda Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yang pertama adalah terbatasnya sumber daya manusia yang berkompeten dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup OPD lingkun Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Kelitbang Kabupaten/Kota serta *stakeholder*. Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan adalah peraturan perundangan yang selalu berganti.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Balitbangda Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balitbangda Provinsi Jambi selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan *stakeholder* yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Balitbangda Provinsi Jambi, antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian oleh OPD maupun masyarakat.
2. Belum optimalnya sinkronisasi dan integrasi kelitbang antar OPD, swasta dan masyarakat.
3. Keterbatasan kompetensi staf, pejabat dan peneliti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi.
4. Pendanaan untuk penelitian belum menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung kelitbang. Karena belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi (internet) dan data digital yang telah dan sedang dikembangkan; dan
6. Masih terbatasnya aktivitas riset yang mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

1.4. Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balitbangda Provinsi Jambi, yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Balitbangda Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2021, tercatat sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang, yang terdiri 21 (dua puluh satu) orang pejabat struktural, 5 (lima) pejabat fungsional peneliti, 1 (satu) pejabat arsiparis dan 22 (dua puluh dua) orang pejabat fungsional umum serta

12 (dua belas) orang non PNS. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

NO.	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	3	2	5
3.	Eselon IV	7	8	15
JUMLAH		11	10	21

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa posisi Pejabat Struktural di Balitbangda Provinsi Jambi sudah lengkap serta proporsi Pejabat Struktural untuk Perempuan dan Laki-laki memiliki proporsi yang hampir sama banyak dan sudah mencerminkan keseimbangan gender.

Tabel 1.2. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2021

NO.	JENIS JABATAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	STRUKTURAL	11	10	21
2.	JF PENELITI	2	3	5
3.	JF ARSIPARIS	0	1	1
4.	JF UMUM	7	15	22
JUMLAH		20	29	49

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas terlihat masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai Balitbangda Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional tertentu dimana sebagian besar pegawai masih menduduki jabatan fungsional umum. Penambahan jabatan fungsional peneliti sangat diperlukan agar memberikan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi secara maksimal.

Tabel 1.3. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin per 31 Desember 2021

NO.	JENIS GOLONGAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	GOLONGAN I	0	0	0
2.	GOLONGAN II	1	1	2
3.	GOLONGAN III	12	23	35
4.	GOLONGAN IV	7	5	12
JUMLAH		20	29	49

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi Jambi paling banyak menduduki Golongan III, diikuti Golongan IV dan terakhir Golongan II. Dari total pegawai

Balitbangda Provinsi Jambi jumlah Perempuan dan Laki-laki masih didominasi dengan pegawai Laki-laki.

Tabel 1.4. Profil Kepegawaian Balitbangda Provinsi Jambi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin per 31 Desember Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	SLTA	2	4	6
2.	S1	6	16	22
3.	S2	12	6	18
4.	S3	0	3	3
JUMLAH		20	29	49

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat pegawai Balitbangda Provinsi lebih banyak didominasi S1 dan S2.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruangrapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Balitbangda Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Balitbangda Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5. Daftar Sarana dan Prasarana Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/Kondisi
1	Alat-alat besar	-	-
2	Alat-alat angkutan	26 Unit	
	- Kendaraan Roda 4	10 Unit	Baik
	- Kendaraan Roda 2	16 Unit	2 Rusak Berat
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.075 Jenis	20 Rusak Berat
4	Alat studio dan alat komunikasi	18Jenis	1 Rusak Berat
5	Bangunan gedung	1 Unit	Baik
6	Jaringan	-	-
7	Buku perpustakaan	-	-
8	Alat-alat Kesehatan	2 jenis	Baik

Sumber : Balitbangda Daerah Provinsi Jambi, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Balitbangda Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi tahun 2021 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2021 Balitbangda Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 12.957.314.554,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.762.145.299,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.195.169.255,-. APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 terjadi Refocusing sehingga anggaran Balitbangda menjadi sebesar Rp. 11.428.519.658,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.019.612.903,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.408.906.755,-. Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 11.688.525.858,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.128.150.604,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.560.375.254,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan LKjIP Balitbada Provinsi Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, penjelasan umum perangkat daerah dengan penekanan pada aspek strategis organisasi seperti tugas dan sasaran sebagaimana penjabaran visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh perangkat daerah dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, tabel perjanjian kinerja. Penjelasan apakah ada perbedaan antara target kinerja pada renja tahun 2020 dengan yang diperjanjikan kinerjanya tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah out put kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab 2 berisi :

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 2.3. Rencana Anggaran Tahun 2019
- 2.4. Instrumen Pendukung

2.1. Perencanaan Strategis

Renstra Balitbangda Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Balitbangda Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010-2015).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama 5 (lima) tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2010-2015) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2016-2021). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan tema *"JAMBI TUNTAS 2021"*.

Tertib : Diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis

yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

Unggul : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Nyaman : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

Adil : Mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera : Mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi untuk periode 2016-2021 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur Provinsi Jambi tersebut dilandasi pada aspek pemenuhan kualitas SDM, Sarana dan Prasarana, Daya Saing Daerah serta Pelayanan Publik. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

- 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan bersetaraan gender;
- 3) Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesetaraan hukum;
- 4) Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan;.

- 5) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- 6) Terwujudnya masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Visi “Tertib, Unggul, Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera” JAMBI TUNTAS 2021					
No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1	MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal “CC”, dan target capaian akhir “B”)	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien	Nilai SAKIP
					Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan
					Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah
					Indeks Transparansi Pemerintah
2	MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (kondisi awal 68,24 dan target capaian akhir 71,8)	Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik	IKM
				Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
					Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)
					Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)
					Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)

				Meningkat-nya kualitas Pendidikan Menengah	Angka Melanjut-kan ke PT Akreditasi B
					Tingkat kelulusan SMA dan SMK
		Meningkat-kan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis	1. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) (kondisi awal 0,809 dan target capaian akhir 0,815)	Meningkatnya Kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	IDG
			2. Indeks kebebasan dari diskriminasi (kondisi awal 96,7 dan target capaian akhir 100)	Meningkat-nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni
				Meningkat-nya harmonisasi kehidupan umat beragama	Indeks Kebebasan Berkeyakinan
3	MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat	Mewujudkan ketertiban umum daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (kondisi awal 70,68 dan target capaian akhir 79,0)	Meningkat-nya stabilitas tibumtran-mas dan hukum	Indeks Aspek Kebebasan Sipil
				Meningkat-nya stabilitas demokrasi di daerah	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi
4	MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi	Meningkat-kan daya saing daerah berbasis IPTEKIN	Nilai Daya Saing (ACI) (Kondisi awal - 0,7379 dan target	Meningkat-nya Total Factor Productivity (TFP)	Total Factor Productivity (TFP)

	pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan		capaian akhir sebesar 0,1)	Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah	Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB
		Meningkat- kan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Petani Tanaman Pangan (Kondisi awal 105,03 dan target capaian akhir sebesar 106,0)	Meningkat- nya ketahanan pangan	Ketersedia-an Energi (kkal/kap/ha ri)
				Meningkatn ya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan	Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300
5	MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkat- kan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta pengelolaan energi	Nilai Komponen daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) (Kondisi awal sebesar - 0,3915 dan target akhir sebesar 0,1)	Terciptanya akselerasi pembangu- nan infrastrukt- ur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomi -an	Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap
					Jalan Provinsi dalam kondisi mantap
				Meningkat- nya pemenuhan kebutuhan listrik	Rasio Elektrifikasi
				Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan
					persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Meningkat- kan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kondisi awal sebesar 52,72 dan target capaian akhir sebesar 66,0)	Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal	persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan

					Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat <i>good mining practise</i>
					persentase perusahaan proper hijau
					Persentase peningkatan industri ekowisata
					Indeks Tata kelola Hutan
					Persentase pengelolaan hutan yang lestari
				Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar
					persentase penurunan luas lahan kritis
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6	MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks kebahagiaan (Kondisi awal 71,1 dan target capaian akhir sebesar 72,5)	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan
				Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka
				Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi, 2019

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Balitbangda Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada Misi ke 4 “Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi/naskah akademik/model hasil penelitian dan pengembangan oleh *Stakeholder*.
3. Meningkatkan inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah.
4. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
5. Meningkatkan publikasi hasil penelitian.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi/naskah akademik/model hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase rekomendasi/ naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	30 %	50%	50%	50%	50%	50%
2	Meningkatnya inovasi daerah untuk mendukung daya saing daerah	Meningkatnya produk unggulan dan inovasi daerah	1. Persentase peningkatan SIDA 2. Persentase inovasi daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	80%	80%	80%	80% 75%	100% 75%	100% 75%
3	Meningkatnyallmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park yang dikembangkan</i>	0	0	0	0	1	1
4	Meningkatnya publikasi hasil kelitbangan	Meningkatnya informasi hasil kelitbangan	Persentase publikasi hasil-hasil kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2020

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Tujuan dan Sasaran dengan Arah Kebijakan Strategi Balitbangda Provinsi Jambi

VISI	: Provinsi Jambi yang Tertib		
MISI I	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja Balitbangda dalam mendukung tugas pokok 3. Peningkatan kedisiplinan dan keseragaman berpakaian 4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah 5. Peningkatan kualitas SDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan laporan dan evaluasi kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja Balitbangda 2. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3. Pengadaan kebutuhan dasar operasional dinas 4. Pengadaan pakaian dinas 5. Pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana 6. Pelatihan dan pendidikan bagi ASN
VISI	: Provinsi Jambi yang Tangguh		
MISI IV	: Meningkatnya daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Langkah Strategi
Optimalisasi pedayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh <i>Stakeholder</i>	Meningkatnya rekomendasi/naskah akademik/model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Mendorong Pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif. 2. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (<i>problem solving</i>) melalui pemanfaatan hasil Litbang. 3. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbangan dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi. 4. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, melalui penyediaan dan penyebaran kertas kerja kebijakan (policy paper) dan risalah kebijakan (policy brief) kepada para pemangku kepentingan.

			5. Mendorong pengembangan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kelitbangan antara lain : gedung, perpustakaan, website dan display inovasi, dan 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Peneliti.
Meningkatnya Inovasi Daerah untuk mendukung daya saing daerah	Meningkatnya produk unggulan dan Inovasi Daerah	Fasilitasi penguatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Memberikan apresiasi pelaksanaan inovasi daerah kepada OPD 2. Pengkoordinasian program SIDA dengan OPD di Pemerintah Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi 3. Pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan komoditi SIDA
Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah	Meningkatnya penerapan teknologi Daerah	Fasilitasi penguatan penerapan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemerintah Provinsi Jambi dan Balitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi 2. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat dalam pengembangan kawasan <i>Science Park</i> .
Meningkatnya publikasi hasil kelitbangan	Meningkatnya akses informasi hasil kelitbangan	Menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan	1. Publikasi hasil kelitbangan melalui berbagai bentuk media cetak dan elektronik, seperti penulisan ilmiah terakreditasi, seminar nasional dan diskusi publik. 2. Meningkatkan kerja sama dengan peneliti/perekayasa, perguruan tinggi dan badan litbang lainnya untuk berkontribusi dalam publikasi hasil kelitbangan. 3. Menunjuk tenaga IT yang profesional dalam pengelolaan publikasi hasil kelitbangan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumenten sebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50%
2	Meningkatkannya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	1. Persentase Peningkatan SIDA 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	1. 100% (1) 2. 75%
3	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park</i> yang dikembangkan	1
4	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase publikasi hasil-hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100%
5	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik	1. Nilai AKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat/Intern (IKM)	1. 62 2. Nilai IKM 80

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi , 2021

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Tahun Anggaran 2021 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 12.957.314.554,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.762.145.299,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.195.169.255,-. APBD Provinsi Jambi Tahun

2021 terjadi Refocusing sehingga anggaran Balitbangda menjadi sebesar Rp. 11.428.519.658,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.019.612.903,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.408.906.755,-. Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 11.688.525.858,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.128.150.604,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.560.375.254,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Meliputi 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

2.3.1. Target Belanja Balitbangda Provinsi Jambi

Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Balitbangda Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp. 11.688.525.858,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 8.128.150.604,00 dan Belanja Langsung Rp. 3.560.375.254,00.

Tabel 2.5. Target Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2020

No	Uraian	Target (Rp)	Prosentase
1	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	8.128.150.604,00	69,54%
2	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan		
3	Belanja Langsung Non Keistimewaan	3.560.375.254,00.	30,46 %
JUMLAH		11.688.525.858,00	100%

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi**

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Rp. 1.117.675.749,-	31,40%	Program Penelitian dan Pengembangan
2	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	Rp. 428.753.470,-	12,04%	Program Penelitian dan Pengembangan
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Rp. 0	0	
4	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Rp. 399.947.180,-	11,23%	Program Penelitian dan Pengembangan

5	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 1.613.998.855,-	45,33%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jumlah		Rp. 3.560.375.254,-	100	

Sumber : Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Balitbangda Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab 3 berisi :

3.1. *Capaian Kinerja Tahun 2019*

3.2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*

3.3. *Realisasi Anggaran*

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Balitbangda Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan

kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balitbangda Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balitbangda Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	%	50%	100%	200%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	- Persentase Peningkatan SIDA - Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	%	- 100% - 75%	200% (2) 79%	200% 105,33%	Sangat Baik Sangat Baik
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Science Park yang dikembangkan		1	1	100%	Sangat Baik
4	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase hasil publikasi Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	%	100%	100%	100%	Sangat Baik
5	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik	- Nilai AKIP - Indeks Kepuasan Masyarakat/Intern (IKM)		- 62 - Nilai IKM 80	70,18 - Nilai IKM 82,639	113,19% 103,30%	Sangat Baik Sangat Baik

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Perjanjian Kinerja menyebutkan bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja utama disajikan dalam Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

**Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	1. Peningkatan SIDa 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah 1. Jumlah pengembangan SIDa Baru 2. (Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i> /Inovasi Daerah yang ada di <i>Stakeholder</i>) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park</i> yang dikembangkan	Sesuai dengan Renstra Kemenristekdikti RI Jumlah <i>Science Park</i>	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase publikasi hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Jumlah Hasil Kelitbangan yang dipublikasikan / Jumlah Hasil Kelitbangan) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Tahun 2021, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator Balitbangda Provinsi Jambi mencapai target yang telah ditetapkan. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1 : Meningkatnya Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder* dengan indikator kinerjanya yakni Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

Dengan perhitungan $(\text{Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan})/(\text{Jumlah Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang dihasilkan}) \times 100\%$. Dengan asumsi n-1 (2021-1) yaitu hasil capaian di Tahun 2020, maka realisasi Capaian Tahun 2021 adalah sebesar 100% . Karena keterlambatan Pengukuhan Nomenklatur Balitbangda Provinsi Jambi yang baru dan musibah pandemi Covid-19 di Tahun 2020 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di bidang-bidang. Hampir semua kegiatan Penelitian dan Pengembangan dihapus yang masih, yaitu **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Ekonomi**, dengan judul **“Kajian Kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Percepatan Penangan Covid-19 secara Komprehensif”**. Kajian ini diimplementasikan oleh Katgas Covid-19 Provinsi Jambi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Kajian ini dimaksudkan memberikan data dukung dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang komprehensif terhadap percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi dengan menilai kesiapan Provinsi Jambi dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan dalam rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Jambi (kajian tahap 1) serta menilai kesiapan penerapan wacana Adaptasi Kebiasaan Baru pada masyarakat dan ketersediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah di fasilitas umum serta kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan menyusun strategi percepatan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jambi.

Hasil dan Rekomendasi

Hasil terhadap kajian pertama tentang kesiapan penerapan PSBB di Provinsi Jambi berdasarkan aspek epidemiologi saat dilakukan kajian ini trend kasus meningkat diikuti dengan meningkatnya trend kesembuhan dan belum ada kasus kematian yang terlapor. Sumber daya kesehatan dan sumber daya lainnya cukup memadai, namun diperlukan pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak juga penting untuk mengedukasi masyarakat agar mengubah perilaku sosial budaya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Semua unsur pertahanan dan keamanan juga transportasi memberikan dukungan namun dalam pemberlakuan kebijakan PSBB dibutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya, jika masyarakat masih belum memahami dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka PSBB tidak efektif dan hanya membebani anggaran daerah yang sangat besar. Kajian tahap pertama merekomendasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi belum perlu dan tidak cukup layak untuk menerapkan PSBB, namun upaya pembatasan sosial secara parsial berdasarkan kebijakan wilayah setempat dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi epidemiologi dan meningkatkan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi rakyat sangat diperlukan untuk dilaksanakan.

Wacana Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pandemi sudah berakhir dan menyebabkan perubahan perilaku berubah menjadi lebih abai. Hasil kajian tahap kedua tentang kesiapan penerapan AKB menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi juga wilayah di Kabupaten/Kota secara umum belum siap menerapkan AKB. Semua perilaku pencegahan seperti cuci tangan pakai sabun, penggunaan masker, jaga jarak dan *social distancing*, disinfeksi rumah/kendaraan, aktivitas fisik, konsumsi peningkat imunitas menjadi jauh lebih rendah dan lebih abai dibandingkan saat awal pandemi kecuali perilaku batuk/bersin yang membaik. Hasil observasi kedisiplinan penggunaan masker hanya berkisar antara 44,2–79,8% dan ketersediaan sarana CTPS di sarana publik yang memenuhi syarat minimal (tersedia air mengalir dan sabun) rata-rata hanya 62,4% (minimal 34,3% dan maksimal 83,9%). Wacana AKB perlu disikapi dengan meningkatkan kesadaran dalam pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan pembudayaannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah perlu terus meningkatkan kegiatan Testing, Tracing, Tracking dan Treatment di seluruh wilayah, penguatan sistem surveilans dan sistem pelayanan kesehatan juga peningkatan kuantitas dan kualitas edukasi dan informasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Kabupaten/Kota, memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan dengan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi. Tetap waspada terhadap penularan baru dengan melakukan penjagaan di perbatasan, pengaturan/pembatasan perjalanan, isolasi dan ketat dalam penerapan protokol kesehatan, edukasi dan partisipasi masyarakat serta terus meningkatkan surveilans aktif.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 diharapkan melakukan penguatan, sinergi dan koordinasi seluruh Satgas Kabupaten/Kota dan Provinsi. Peningkatan pengawasan, kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan sanksi tindak yang tegas bagi yang melanggar aturan yang berlaku (memperhatikan Inpres Nomor 6/2020 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35/2020 tentang Pedoman AKB menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Provinsi Jambi).

Masyarakat agar dapat berpartisipasi dan komunikasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga masyarakat, serta dunia usaha dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di seluruh wilayah. Masyarakat harus menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara konsisten, membudayakan PHBS dan Gerakan masyarakat hidup sehat serta selalu mempedomani KepMenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan SKB 4 Menteri tentang Panduan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Bidang Kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesmas Covid-19 tanggal 7 Agustus 2020.

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50%	100%	200%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Target		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Rekomendasi yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	Persentase	50%	50%	100	50%	12,5%	25%	50%	100%	200%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Sasaran #2 : Meningkatkan Produk Unggulan dan Inovasi Daerah dengan indikator kinerjanya, yakni : 1. Peningkatan Sida (2) dan ; 2. Persentase Inovasi daerah yang diimplementasikan stakeholder.

Sasaran ini dicapai melalui program Penelitian dan Pengembangan yang operasionalisasinya didukung oleh Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif

Indikator kinerja Persentase Peningkatan SIDA (100% (1)) melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 200% dengan menyusun dan *Lounging Radmap* SIDA Tahun 2019-2023 berbasis komoditi Nanas dan Pinang. Dimana sebelumnya Tahun 2014-2018, Provinsi Jambi telah menyelesaikan seluruh tahapan SIDA berbasis komoditi Kopi.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan Masyarakat di Daerah. SIDA tidak hanya berbasis komoditi saja namun mengatur keseluruhan sistem dalam pelaksanaan inovasi di daerah yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu sebagai acuan

dalam pelaksanaan inovasi dalam bentuk pelayanan publik, Tata Kelola Pemerintahan, dan Inovasi Bentuk Lainnya.

Indikator kinerja persentase inovasi daerah yang diimplementasikan *stakeholder* (75%) melebihi targe yang telah ditetapkan yaitu sebesar 79%. Indikator ini diperoleh dengan dengan diadakannya Lomba Inovasi Daerah antar OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dari Lomba ini diharapkan terbangunnya budaya inovasi daerah pada OPD, tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh dan dapat direplikasikan/ditransfer/ditiru oleh OPD lain serta peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah. Pada pasal 13 diamanatkan bahwa setiap OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi wajib mengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait denngan bidang tugas SKPD tersebut. Jumlah OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 43 OPD dan 34 OPD yang mengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait dengan bidang tugas OPD tersebut dalam lomba Inovasi Daerah, dengan kata lainnya dari 43 Inovasi yang ada di OPD sebanyak 34 Inovasi yang diaplikasikan OPD sehingga persentase Inovasi daerah yang diimplemtasi stakeholder sebanyak 34 OPD dari 43 OPD yang ada di Pemerintah Provinsi Jambi atau sebesar 79%.

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan SIDA - Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i> 	%	<ul style="list-style-type: none"> - 200% - 75% 	<ul style="list-style-type: none"> 200% (2) 79%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran strategis melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7. Capaian Kinerja 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase produk unggulan yang diSIdakan	%	80%	80%	100	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Peningkatan SIDA	Persentase	-	-	-	100%	0%	0%	100%	200% (2)	200%
3	Persentase Inovasi daerah yang diimplementasikan stakeholder	Persentase	75%	75%	100%	75%	0%	0%	75%	79%	103,33 %

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Sasaran #3: Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah dengan indikator kinerjanya, *Science Park* yang dikembangkan.

Tahun 2021 Sasaran ini dicapai melalui program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah yang operasionalisasinya didukung Kegiatan *Science Park* di Provinsi Jambi dan adanya musibah pandemi Covid-19 maka terjadi refocusing anggaran yang mengakibatkan penghapusan kegiatan *Science Park* di Provinsi Jambi sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan lagi.

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Science Park yang dikembangkan	Jumlah Science Park	1	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Tabel 3.9. Capaian Kinerja 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pengembangan Kawasan Science Park	%	25%	25%	100	-	-	-	-	-	-
2	Science Park yang dikembangkan	1	0	0	1	0	0	-	1	1	100%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Balitbangda Provinsi Jambi sebagai fasilitator dalam interaksi antar sektor inovasi di provinsi, melalui kegiatan *Science Park* di Provinsi Jambi telah menyikapi kebijakan pemerintah pusat dalam menyiapkan wahana interaksi antar aktor inovasi tersebut. Walaupun sampai Tahun 2021, *Science Park* di Provinsi Jambi belum terlaksana pembangunan fisik, namun telah melakukan upaya setahap demi setahap untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan *Science Park*.

Tahun 2016 Balitbangda Provinsi Jambi telah menyusun *Master Plan* pembangunan *Science Park* Provinsi pada lahan seluas 25.723.914 Ha yang terletak di kawasan Bumi Perkembangan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Sebagai tindak lanjut pembuatan *Master Plan* yang dilaksanakan tahun 2016, maka tahun 2017 diperkuat dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 835.KEP.GUB/SET.PBMD.2.3/2017 tentang Penetapan status penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungaim Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 9,7 Ha.

Tahun 2018 dan 2019 persentase pengembangan kawasan *Science Park* mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2018 telah dilaksanakan pemasangan Papan Merk dan pemasangan patok yang telah ditetapkan agar lokasi pembangunan *Science Park* dapat terpelihara dan berkembang lebih baik. Tahun 2019 telah dilakukan pembersihan lahan (tebang tebas) tahap I *Science Park* Provinsi Jambi. Tahun 2020 direncanakan pembersihan lahan (tebang tebas) tahap II seluas 7,7 Ha namun kegiatan dimaksud tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya refocusing anggaran. Tahun 2021 walaupun tidak ada anggaran untuk Pengembangan Kawasan *Science Park* tetapi target kinerja persentase pengembangan kawasan *Science Park* untuk Tahun 2021 sudah mencapai target (100%) dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 835.KEP.GUB/SET.PBMD.2.3/2017 tentang Penetapan status penggunaan tanah

milik Pemerintah Provinsi Jambi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang terletak di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 9,7 Ha walaupun belum ada pembangunan fisik di Kawasan Science Park tersebut.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Pengembangan Kawasan Science Park adalah :

1. Tebatasnya dana, dimana untuk pembangunan kawasan *Science Park* ini sangat membutuhkan dana yang besar; dan 2. Belum adanya kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang ada di Provinsi Jambi.

Sasaran #4: Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase publikasi hasil-hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat.

Sasaran ini dicapai melalui program Penelitian dan Pengembangan dengan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang operasionalisasinya didukung dengan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan. Kegiatan yang dilaksanakan Penerbitan Jurnal Balitbangda Provinsi Jambi Khazanah Intelektual yang mendedikasikan sebagai wadah dari publikasi artikel para peneliti dan jabatan fungsional lainnya. Sedangkan artikel yang disajikan fokus pada kebijakan pembangunan daerah. Jurnal terbit 3 (tiga) edisi setiap edisi terdapat 6 (enam) artikel untuk bulan April, Agustus dan Desember.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase publikasi hasil-hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Tabel 3.11. Capaian Kinerja 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase hasil publikasi kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	%	75%	75%	100	100%	100%	100	100%	100%	100

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Sasaran #5 : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator kinerjanya yakni : 1. Nilai AKIP; dan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat/Intern (IKM);

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah negara tergantung pada masyarakatnya. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggungjawab.

Sasaran ini dicapai melalui program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik	- Nilai AKIP	- 62	- 70,18	113,19
		- Indeks Kepuasan Masyarakat/ Intern (IKM)	- Nilai IKM 80	- Nilai IKM 82,639	103,30

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Balitbangda Provinsi Jambi memperoleh nilai sebesar 70,18 yang menunjukkan dalam kategori BB atau Sangat Baik. Nilai ini diperoleh hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Jambi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi internal; dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Balitbangda Provinsi Jambi menunjukkan nilai 82,639 yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan. Semua unsur menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Balitbangda Provinsi Jambi berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK. Nilai IKM ini naik dari tahun 2020 yaitu 81,528 menjadi 82,639 Tahun 2021. Untuk kedepannya Balitbangda Provinsi Jambi harus lebih berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima.

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13. Capaian Kinerja 2019-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Nilai IKM 78	Nilai IKM 78	100%	Nilai IKM 79	Nilai IKM 81,528	103,2	Nilai IKM 80	Nilai IKM 82,639	103,3
2	Nilai AKIP	Nilai AKIP	61	59,85	98,11 %	61	71,01	116,41	62	70,18	113,19
3	Opini Laporan Keuangan		Baik	Baik	Baik	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Standar Nasional

Sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya, belum terdapat standar nasional untuk kinerja Balitbangda Provinsi Jambi yang disusun oleh Kementerian maupun Instansi Vertikal pada bidang kelitbangan, sehingga realisasi capaian kinerja Balitbangda Provinsi Jambi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional.

3.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Balitbangda Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Pagu Anggaran Tahun 2021

Dana APBD sebesar Rp. 11.688.525.858,- dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja tidak langsung	Rp. 8.128.150.604,00
➤ Belanja Langsung	Rp. 3.560.375.254,00
Belanja pegawai	Rp. 415.580.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp. 3.143.326.754,00
Belanja Modal	Rp. 1.468.500,00

2. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021

Penyerapan belanja sebesar Rp. 11.688.525.858,00 atau 84,87% dengan sisa anggaran Rp. 1.769.028.038,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja tidak langsung Rp. 6.528.436.937,00 (80,32%)
- Belanja Langsung Rp. 3.391.060.883,00 (95,24%)

Tahun Anggaran 2021 Balitbangda Daerah Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 12.957.314.554,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.762.145.299,- dan belanja langsung sebesar Rp. 4.195.169.255,-. APBD Provinsi Jambi Tahun 2021 terjadi Refocusing sehingga anggaran Balitbangda menjadi sebesar Rp. 11.428.519.658,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.019.612.903,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.408.906.755,-. Anggaran Perubahan Balitbangda Provinsi Jambi sebesar Rp. 11.688.525.858,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.128.150.604,- dan belanja langsung sebesar Rp. 3.560.375.254,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung, meliputi 2 (dua) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Meliputi Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Jumlah anggaran sebesar Rp. 263.127.890,00 dengan realisasi sebesar Rp. 257.776.540,00 (97,97%). Kegiatan ini berkontribusi dalam pencapaian Nilai AKIP.

2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi. Jumlah anggaran sebesar Rp. 30.710.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.710.000,00 atau 100%. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian IKM.

3. Kegiatan Administrasi Umum

Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Jumlah anggaran

sebesar Rp. 370.117.327,00 dengan realisasi sebesar Rp. 363.821.621,00 (98,30%) %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian IKM.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik serta Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Jumlah anggaran sebesar Rp. 356.423.638,00 dengan realisasi sebesar Rp. 351.239.792,00 (98,55%) %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian IKM.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Meliputi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Jumlah anggaran sebesar Rp. 593.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 544.915.199,00 (91,80%) %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian IKM.

b. Program Penelitian dan Pengembangan

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
Meliputi Sub Kegiatan Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan serta Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 258.054.550,00 dengan realisasi sebesar Rp. 239.465.527,00 (92,80%) %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
Dengan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Jumlah anggaran sebesar Rp. 141.898.680,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.923.204,00 (97,20%) %. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Meliputi Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sub Kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Pangan serta Sub Kegiatan dan Penelitian Pekerjaan Umum. Jumlah anggaran sebesar Rp. 599.957.999,00 dengan realisasi sebesar Rp. 585.356.690,00 (97,57%). Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder*.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Meliputi Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan serta Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual. Jumlah anggaran sebesar Rp. 946.465.170,00 dengan realisasi sebesar Rp. 879.852.310,00 (92,96%).

**Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2021**

NO	OPD/NAMA PROGRAM URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DPA			PERKEMBANGAN PELAKSANAAN			SISA ANGGARAN Rp.	
		APBD MURNI Rp.	PERUBAHAN Rp.	JUMLAH TOTAL Rp.	REALISASI KEUANGAN		FISIK %		
					Rp	%			
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
BELANJA LANGSUNG									
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			357.317.110,00	263.127.890	263.127.890,00	257.776.540,00	97,97	100,00	5.351.350,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	252.424.110,00	193.846.890	193.846.890	189.167.540,00	97,59	100,00	4.679.350,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	104.893.000,00	69.281.000	69.281.000	68.609.000,00	99,03	100,00	672.000,00	
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			94.880.000,00	30.710.000	30.710.000,00	30.710.000,00	100,00	100,00	0,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	94.880.000,00	30.710.000	30.710.000	30.710.000,00	100,00	100,00	0,00	
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah			586.184.817,00	380.402.327	370.117.327,00	363.821.621,00	98,30	100,00	6.295.706,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.635.500,00	9.635.500	9.635.500,00	9.635.500,00	100,00	100,00	0,00	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.546.562,00	72.286.462	72.286.462	72.286.062,00	100,00	100,00	400,00	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.957.000,00	13.804.000	13.804.000	13.804.000,00	100,00	100,00	0,00	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.032.750,00	33.797.750	33.797.750	33.192.750,00	98,21	100,00	605.000,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000	7.000.000,00	6.960.000,00	99,43	100,00	40.000,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	401.013.005,00	233.593.615	233.593.615	227.943.309,00	97,58	100,00	5.650.306,00	
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			355.607.658,00	346.138.638	356.423.638,00	351.239.792,00	98,55	100,00	5.183.846,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.693.322,00	32.887.322	32.887.322	32.887.000,00	100,00	100,00	322,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.544.210,00	134.829.210	134.829.210,00	129.645.686,00	96,16	100,00	5.183.524,00	

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.370.126,00	188.707.106	188.707.106	188.707.106,00	100,00	100,00	0,00
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		593.620.000,00	593.620.000	593.620.000,00	544.915.199,00	91,80	100,00	48.704.801,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	441.380.000,00	441.380.000	441.380.000,00	393.290.199,00	89,10	100,00	48.089.801,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.580.000,00	19.580.000	19.580.000,00	19.565.000	99,92	100,00	15.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.660.000,00	132.660.000	132.660.000,00	132.060.000,00	99,55	100,00	600.000,00
6 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		308.119.550,00	258.054.550	258.054.550,00	239.465.527,00	92,80	100,00	18.589.023,00
1	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	208.100.580,00	158.035.580	158.035.580,00	156.237.996,00	98,86	100,00	1.797.584,00
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100.018.970,00	100.018.970	100.018.970,00	83.227.531,00	83,21	100,00	16.791.439,00
7 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		191.900.080,00	141.898.680	141.898.680,00	137.923.204,00	97,20	100,00	3.975.476,00
1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	191.900.080,00	141.898.680	141.898.680,00	137.923.204,00	97,20	100,00	3.975.476,00
8 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		550.000.000,00	449.958.000	599.957.999,00	585.356.690,00	97,57	100,00	14.601.309,00
1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	175.000.000,00	289.521.999	289.521.999,00	286.428.550,00	98,93	100,00	3.093.449,00
2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	175.000.000,00	144.756.000	144.756.000,00	135.100.200,00	93,33	100,00	9.655.800,00
3	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	200.000.000,00	165.680.000	165.680.000,00	163.827.940,00	98,88	100,00	1.852.060,00
9 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1.157.540.040,00	946.465.170	946.465.170,00	879.852.310,00	92,96	100,00	66.612.860,00
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	166.641.240,00	117.764.520	117.764.520,00	109.490.100,00	92,97	100,00	8.274.420,00
2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	318.567.160,00	280.024.660	280.024.660,00	266.141.700,00	95,04	100,00	13.882.960,00

3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	172.331.660,00	148.728.810	148.728.810,00	134.602.110,00	90,50	100,00	14.126.700,00
4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	334.711.590,00	260.301.790	260.301.790,00	243.755.550,00	93,64	100,00	16.546.240,00
5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	165.288.390,00	139.645.390	139.645.390,00	125.862.850,00	90,13	100,00	13.782.540,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		4.195.169.255,00	3.560.375.254	3.560.375.254,00	3.391.060.883,00	95,24	100,00	169.314.371,00
BELANJATIDAK LANGSUNG								
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.762.145.299,00	8.019.612.903	8.128.150.604,00	6.528.436.937,00	80,32	100,00	1.599.713.667,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.762.145.299,00	8.128.150.604	8.128.150.604,00	6.528.436.937,00	80,32	100,00	1.599.713.667,00
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		12.957.314.554,00	11.688.525.858	11.688.525.858,00	9.919.497.820,00	84,87	100,00	1.769.028.038,00

Sumber : LPPK Balitbangda Provinsi Jambi, 2021

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50	100	200	1.117.675.749,-	1.072.235.521,-	95,93
2	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	- Persentase Peningkatan SIDA	100 (1)	200 (2)	200	280.024.660,-	266.141.700,-	95,04
		- Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	75	79	105,33	148.728.810,-	134.602.110,-	90,50
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Science Park yang dikembangkan	1	1	100	0	0	-
4	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase hasil publikasi Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100	100	100	399.947.180,-	369.618.400,-	92,42
5	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas Kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP	62	70,18	113,19	1.613.998.855,-	1.548.463.152,-	95,94
		Nilai IKM	80	82,639	103,30			
Belanja langsung pendukung						0	0	0
Belanja tidak langsung						8.128.150.604,-	6.528.436.937	80,32
Jumlah belanja langsung						3.560.375.254,-	3.391.060.883,-	95,24
Total Belanja						11.688.525.858,-	9.919.497.820,-	84,87

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

3.4. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.16. Analisis Efisiensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
			Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	% Capaian Kinerja (≥100%)		
1.	Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50	100	200	95,93	4,07
2.	Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	Persentase Peningkatan SIDA	100	200	200	95,04	4,96
		Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	75	79	105,33	90,50	9,50
3.	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	Science Park yang dikembangkan	1	1	100	0	0
4.	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase hasil publikasi Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100	100	100%	92,42	7,58
5	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas kinerja serta Kualitas Pelayanan Publik	Nilai AKIP	62	70,18	113,19%	95,94	4,06
		Indeks Kepuasan Masyarakat/Intern (IKM)	80	82,639	103,30%		
TOTAL						95,24	4,76

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan data yang diuraikan pada Tabel 3.16 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas sasaran strategis Balitangda Provinsi Jambi Tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun serapan anggaran Tahun 2021 sebesar 95,24% atau terdapat efisiensi sebesar 4,76%. Efisiensi dimaksud merupakan penghematan atas penggunaan sarana dan prasana pada setiap kegiatan. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai dengan indikator kinerja Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan *Stakeholder* sebesar 9,50 dan tingkat efisiensi terendah dicapai dengan indikator kinerja Nilai AKIP dan IKM (Intern) sebesar 4,06.

BAB IV

PENUTUP

Bab 4 berisi :

- 4.1. *Kesimpulan*
- 4.2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Balitbangda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

LKJIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 merupakan akumulasi pertanggungjawaban atas kinerja Balitbangda Provinsi Jambi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan tersebut beserta hasil-hasilnya.

Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 perlu melaporkan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja terhadap target-target yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Jambi 2016-2021, yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan *Stakeholder* memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.117.675.749,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.072.235.521,- (95,93%). Capaian kinerja Tahun 2021 100% dari 50% yang ditargetkan.
2. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan SIDA dan Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan *Stakeholder* dengan anggaran Rp. 428.753.470,- dengan realisasi sebesar Rp. 400.743.810,- (96,47%). Capaian kinerja Tahun 2021 200% (2 Komoditi) dari 100% (1 komoditi) yang ditargetkan serta 79% dari 75% yang ditargetkan.
3. Indikator Kinerja *Science Park* yang dikembangkan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- . Target kinerja tercapai 100% dengan telah adanya Kaasan Science Park di Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi alaupun belum ada pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang disebabkan keterbatasan anggaran.
4. Indikator Kinerja Persentase hasil publikasi Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 399.947.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 369.618.400,- (92,42%). Capaian kinerja Tahun 2020 100% dari 100% yang ditargetkan.

5. Indikator Kinerja Nilai AKIP dan IKM dengan anggaran sebesar Rp. 1.613.998.855,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.548.463.152,- (95,943%). Capaian kinerja Tahun 2021 dengan Nilai AKIP 70,18 dari 62 yang ditargetkan dan IKM 82,639 dari 80 yang ditergetkan.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan standar daerah.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
3. Menata sistem penentuan topik penelitian yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Litbang prioritas secara lebih selektif.
4. Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil Litbang.
5. Peningkatan kualitas dan sinergisitas program kelitbang dengan OPD di Pemerintahan Provinsi Jambi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi.
6. Melaksanakan diseminasi hasil-hasil kelitbang, melalui penyediaan dan penyebarluasan kertas kerja kebijakan (*policy paper*) dan risalah kebijakan (*policy brief*) kepada para pemangku kepentingan.
7. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan OPD terkait Pemprov Jambi dan Badan Litbang Kab/Kota se-Provinsi Jambi.
8. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, inkubator bisnis dan masyarakat dalam pengembangan kawasan *Science Park*.
9. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective* dan *learning and growth perspective*.

Demikian LKjIP Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021 yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 2021
Kepala Badan,

Ir. AZRIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

L A M P I R A N

Lampiran 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i>	50%
2	Meningkatkannya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	1. Persentase Peningkatan SIDA 2. Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	1. 100% (1) 2. 75%
3	Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park</i> yang dikembangkan	1
4	Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase publikasi hasil-hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	100%
5	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta kualitas pelayanan publik	1. Nilai AKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat/Intern (IKM)	1. 62 2. Nilai IKM 80

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.749.754.884,00	APBD
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.207.559.670,00	APBD
TOTAL ANGGARAN	12.957.314.554,00	

GUBERNUR JAMBI,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM.

Jambi, Januari 2021

**KEPALA BALITBANGDA,
PROVINSI JAMBI**

Ir. AZRIN, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196602241992031002



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ir. AZRIN, M.Si.**
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Provinsi Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.**
Jabatan : Gubernur Jambi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. FACHRORI UMAR, M.HUM

Ir. AZRIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660224 199203 1 002

Lampiran 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

OPD	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Dasar	: <ol style="list-style-type: none">1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi
Tugas	: Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
Fungsi	: <ol style="list-style-type: none">1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di Pemerintahan Provinsi;2. penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;3. pelaksanaan kegiatan kelitbangan di pemerintahan provinsi;4. pembinaan dan fasilitasi kelitbangan kepada Perangkat Daerah pelaksana kelitbangan kab/kota;5. pelaksanaan fasilitasi, promosi dan evaluasi inovasi daerah;6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan di provinsi;7. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah provinsi;8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada balitbangda;9. memberikan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitiannya oleh instansi yang berwenang;10. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Warga Negara Asing di Daerah;11. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi; dan12. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Indikator Kinerja Utama :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Alasan Formulasi Hitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>Stakeholder</i> .	Persentase Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang diaplikasikan <i>stakeholder</i>	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang sudah diaplikasikan) / (Jumlah Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model yang dihasilkan) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Produk Unggulan dan Inovasi Daerah	1.Peningkatan SIDA 2.Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i>	Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dengan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah 1.Jumlah pengembangan SIDA Baru 3. (Inovasi Daerah yang diimplementasikan <i>Stakeholder</i> /Inovasi Daerah yang ada di <i>Stakeholder</i>) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Penerapan Teknologi Daerah	<i>Science Park</i> yang dikembangkan	Sesuai dengan Renstra Kemenristekdikti RI Jumlah <i>Science Park</i>	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan
Meningkatnya Akses Informasi Hasil Kelitbangan	Persentase publikasi hasil Kelitbangan yang dapat diakses masyarakat	Sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 (Jumlah Hasil Kelitbangan yang dipublikasikan /Jumlah Hasil Kelitbangan) X 100%	Balitbangda	Laporan Akhir Kegiatan

Jambi,
KEPALA BADAN,

2021

Ir. A Z R I N, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19662404 199203 1 002

Lampiran 3

Penghargaan yang diraih Balitbangda Tahun 2021

1. Lomba *Innovative Government Award* (IGA) dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah

Provinsi Jambi yang dikoordinir Balitbangda Provinsi Jambi, sejak tahun 2019 telah mengikuti Penilaian Indeks Inovasi Daerah/Lomba *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI. Secara berturut-turut Provinsi Jambi menempati Peringkat 10 Tahun 2019, Tahun 2020 menempati Peringkat 8 dan Tahun 2021 Provinsi Jambi masuk nominator 7 provinsi yang mendapatkan Penghargaan IGA dari Menteri Dalam Negeri selain Provinsi Sumsel, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Jateng, Provinsi Jabar, Provinsi Jatim, Provinsi Sumbar dan Provinsi Banten. Penghargaan untuk Provinsi Jambi diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan diterima langsung oleh Gubernur Dr. Al Haris, MH, di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2021. Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi dengan skor 61,03 dengan predikat Sangat Inovatif.



2. Mengikuti Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing daerah yang diselenggarakan Badan Riset dan dan Inovasi Nasional dengan Nilai Indeks 1,866 dengan Predikat Sedang. Adapun Aspek yang dinilai adalah a. Aspek Ekosistem Inovasi; b. Aspek Penguatan; c. Aspek Sumber Daya Manusia; dan d. Aspek Pasar.

Lampiran 4. MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan surat menyurat	Jumlah surat keluar		78	8000 lbr	109	8000 lbr	120	8000 lbr	152	8000 lbr	214	8000 lbr	299	8.000 lbr	300	48.000 lbr	Balitbangda
			Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya Air dan listrik	Periode pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik		170	12 bulan	238	12 bulan	250	12 bulan	333	12 bulan	466	12 bulan	653	12 bulan	700	72 bulan	Balitbangda
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan		135	12 bulan	189	12 bulan	200	12 bulan	264	12 bulan	370	12 bulan	518	12 bulan	600	72 bulan	Balitbangda
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan		120	1 paket	168	1 paket	190	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	500	6 paket	Balitbangda
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		40	47 jenis	56	47 jenis	112	47 jenis	156	47 jenis	219	47 jenis	307	47 jenis	400	262 jenis	Balitbangda
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dan Jenis Buku		40	3 paket	56	3 paket	56	3 paket	60	3 paket	75	3 paket	80	3 paket	85	18 paket	Balitbangda
			Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan penggandaan dan cetakan		25	10 jenis	35	10 jenis	40	10 jenis	49	10 jenis	68	10 jenis	96	10 jenis	100	60 jenis	Balitbangda
			Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik		12.000	1 paket	16	1 paket	20	1 paket	23	1 paket	32	1 paket	46	1 paket	50	6 paket	Balitbangda
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah peserta rapat/tamu		50	500 org	70	500 org	80	500 org	98	500 org	137	500 org	192	500 org	300	3000 org	Balitbangda
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan		400	35 kali	560	35 kali	650	35 kali	784	35 kali	1.097	35 kali	1.536	35 kali	1.600	210 kali	Balitbangda
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional		400	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	560	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	600	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	784	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.097,6	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2	1.536,6	1 unit roda 2 unit roda 2	1.800	6 unit roda 12 unit roda 2	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor		135	1 paket	189	1 paket	200	1 paket	264	1 paket	370	1 paket	518	1 paket	600	6 paket	Balitbangda
			Pengadaan peralatan gedung/kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor		58	1 paket	81	1 paket	90	1 paket	113	1 paket	159	1 paket	222	1 paket	300	6 paket	Baliitbangda
			Pengadaan mebeleur	Jumlah /jenis pengadaan mebeleur		45	1 paket	63	1 paket	70	1 paket	88	1 paket	123	1 paket	172	1 paket	200	6 paket	Baliitbangda
			Pengadaan Alat Studio	Jumlah /jenis pengadaan Alat Studio		50	1 paket	65	1 paket	75	1 paket	89	1 paket	120	1 paket	170	1 paket	200	6 paket	Baliitbangda
			Pengadaan komputer	Jumlah pengadaan komputer, laptop dan printer.		120	1 paket	168	1 paket	180	1 paket	235	1 paket	329	1 paket	460	1 paket	600	6 paket	Baliitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung /kantor	Jumlah unit kantor		250	1 paket	350	1 paket	400	1 paket	490	1 paket	686	1 paket	960	1 paket	1.000	6 paket	Baliitbangda
			Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara		450	1 ta hun	630	1 ta hun	700	1 tahun	882	1 tahun	1.234	1 tahun	1.728	1 tahun	1.900	6 tahun	Baliitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan listrik dan elektronik	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang terpelihara		32.000	1 ta hun	44.800	1tahun	50.000	1 tahun	62.720	1 tahun	87.808	1 tahun	122.931	1 tahun	1.500	6 tahun	Baliitbangda
			Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pedrlengkapan gedung kantor yang terpelihara		250	1 tahun	350	1 ta hun	400	1 tahun	490	1 tahun	686	1 tahun	960	1 tahun	1.200	6 tahun	Baliitbangda
			Pemeliharaan Berkala rutin peralatan gedung kantor	Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara		100	1 ta hun	140	1 ta hun	160	1 tahun	196	1 tahun	274	1 tahun	384	1 tahun	500	6 tahun	Baliitbangda
			Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhab		3.000	1 ta hun	4.200	1 paket	5.000	1 paket	5.880	1 paket	8.232	1 paket	11.524	1 paket	15.000	6 paket	Baliitbangda
			Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun		1.000	1 paket	2.500	1 paket	3.500	1 paket	5.500	1 paket	6.000	1 paket	15.000	1 paket	18.000	6 paket	Baliitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
			Pengadaan Peralatan Inkubator	Jumlah Mesin Inkubator		175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	175	1 unit	Balitbangda
			Pengadaan Mesin Penggiling Karet	Jumlah Penggiling Karet		125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	Balitbangda
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng kapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertetu		40	67 org	56	70 org	60	72 org	78	75 org	109	83 org	153	85 org	200	452 org	Balitbangda
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat formal/ bintek		200	4 org	280	4 org	300	4 org	392	4 org	548	4 org	768	4 org	900	24 org	Balitbangda
			Program Penelitian dan Pengembangan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pengembangan Wilayah, Fisikdan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda

			Litbang Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Kependudukan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemberdayaan Masyarkat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Penyeenggaraan Pemerintahan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Pemerintahan Desa	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Inovai dan Pengemb. Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Difusi Inovai dan Penerapan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Penelitian Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan SKPD terkait		1.200	1 Reko mendasi	1.400	1 Reko mendasi	1.600	1 Reko mendasi	1.960	1 Reko mendasi	2.744	1 Reko mendasi	3.841	1 Reko mendasi	4.000	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Rakor dan Forum Kelitbangan	Jumlah Rakor yang dilaksanakan		250	2 kali	350	2 kali	400	2 kali	490	2 kali	686	2 kali	960	2 kali	1.100	12 kali	Balitbangda
			Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Kinerja Balitbangda	Jumlah laporan kinerja hasil litbang		250	12 buku	300	12 buku	330	12 buku	375	12 buku	521	12 buku	729	12 buku	850	72 buku	
			Dewan Riset Daerah (DRD)	Jumlah rekomendasi yang		450	1 Reko	630	1 Reko	700	1 Reko	882	1 Reko	1.234	1 Reko	1.728	1 Reko	1.900	6 Reko	Balitbangda

Kode			Jenis Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kinerja Pada Akhir Periode		SKPD Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
						Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	
				disusun			mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi		mendasi	
			Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	3 kali terbit	800	18 kali terbit	Balitbangda
			Peningkatan Kompetensi Peneliti	Jumlah seminar, lokakarya,workshop yang diiukti		300	5 Orang	357	5 orang	400	5 orang	499	5 orang	699	5 orang	979	5 Orang	1.100	30 Orang	Balitbangda
			Penguatan Jaringan penelitian di Provinsi Jambi	Jumlah kerjasama		400	1Kerjasama	560	1Kerjasama	600	1Kerjasama	784	1Kerjasama	1.096	1 Kerja sama	1.600	1 Kerjasama	1.750	6 Kerjasama	Balitbangda
			Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	Jumlah Buku Persyaratan IG		224	1 Buku Persyaratan IG	490	1 Buku Persyaratan IG	550	1 Buku Persyaratan IG	686	1 Buku Persyaratan IG	960	1 Buku Persyaratan IG	1.344	1 Buku Persyaratan IG	1.900	6 Buku Persyaratan IG	Balitbangda
			Diseminasi Dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian	Jumlah Pertemuan		257	4 Pertemuan	359	4 Pertemuan	400	4 Pertemuan	503	4 Pertemuan	705	4 Pertemuan	987	4 pertemuan	1.050	24 pertemuan	Balitbangda
			Sumber Daya Genetik Produk Unggulan	Jumlah Buku Khasanah IG		175	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	245	1 kali sosialisasi	300	1 kali sosialisasi	480	1 kali sosialisasi	660	1 kali sosialisasi	800	6 kali sosialisasi	Balitbangda
			Seminar Nasional	Jumlah judul yang diseminarkan		125	10 Judul	140	10 Judul	150	10 Judul	165	10 Judul	185	10 Judul	200	10 Judul	500	60 Judul	Balitbangda
			Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	768	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota & 1 Inovasi OPD	900	6 Roadmap SIDA di Kab/Kota dan 3 Inovasi OPD	Balitbangda
			Science Park	Jumlah SP		2.700	1 Pembangunan an Fisik	3.780	1 Pembangunan an Fisik	4.000	1 Pembangunan an Fisik	5.292	1 Pembangunan an Fisik	7.408	1 Pembangunan an Fisik	10.372	1 Pembangunan an Fisik	12.000	1 Pembangunan an Fisik	Balitbangda
			Pengembangan Pusat Tekno logi Reklamasi Lahan	Jumlah Laporan Reklamasi lahan		198	1 Reko mendasi	350	1 Reko mendasi	360	1 Reko mendasi	388	1 Reko mendasi	543	1 Reko mendasi	760	1 Reko mendasi	900	6 Reko mendasi	Balitbangda
			Pengembangan Sentra Promosi IPTEK	Jumlah inovasi teknologi yang dihasilkan		350	6 TTG 12 KTI	490	6 TTG 12 KTI	550	6 TTG 12 KTI	686	6 TTG 12 KTI	960	6 TTG 12 KTI	1.344	6 TTG 12 KTI	1.500	36 TTG 72 KTI	Balitbangda
			Penerapan & Pengembangan Chitin Chitosan	Jumlah Pelatihan Pembuatan Chitin-Chitosan		125	1 kali	130	1 kali	135	1 kali	145	1 kali	175	1 kali	200	1 kali	500	5 kali	Balitbangda

Tabel 5.2. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI

Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K o d e	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Optimalisasi Pendayagu naan Rekomenda si hasil Kelitbangan oleh Stakeholder	Meningkatnya Rekomendasi yang diaplikasikan Stakeholder	Persentase Reko-mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		Penelitian dan Pengemban gan Litbang Subbid Ekonomi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid SDA dan Lingk. Hidup	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Pengemban gan Wilayah, Fisikdan Prasarana	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomend asi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekomen dasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K o d e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Litbang Subbid Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Penyelengga an Pemerintaha n	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	
				Litbang Subbid Data dn Pengkajian Peraturan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekom endasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekomen dasi	1.960	1 Rekomen dasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit bangda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				Litbang Subbid Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Pengembang an Inovai dan Teknologi	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Diseminasi Kelitbangan	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litban Subbid Sosial dan Budaya	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Litbang Subbid Kependuduk	Jumlah Reko mendasi yang		1.200	1 Rekomen	1.400	1 Rekom	1.600	1 Rekome	1.960	1 Rekom	2.744	1 Rekome	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
				an	diaplikasikan Stakeholder			dasi		endasi		ndasi		endasi		ndasi				
				Litbang Subbid Pemberdaya anMasyarkat	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekom endasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Mandiri	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
				Peneliti Analisis Kebijakan Antisifatif dan Responsif	Jumlah Reko mendasi yang diaplikasikan Stakeholder		1.200	1 Rekomen dasi	1.400	1 Rekome ndasi	1.600	1 Rekome ndasi	1.960	1 Rekom endasi	2.744	1 Rekome ndasi	3.841	5 Reko mendasi	Balit banda	
2.Meningkatka n Inovasi dan Teknologi Daerah dalam	Meningkatn ya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Produk	1. Persent ase Kelemb agaan SIDa		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah Sistem	1. Roadmap SIDA		200	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	280	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	300	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	392	1 Roadma p SIDA di Kab/Kot a	548	1 Roadmap SIDA di Kab/Kota	768	6 Roadma p SIDA	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Mendukung Daya Saing Daerah	Unggulan dan meningkatn ya kreativitas masyarakat dalam menulis Karya Ilmiah serta menciptaka n Inovasi Teknologi berbasis ilmiah	2. Persent ase Produk Unggula n yang terlindun gi		Inovasi Daerah Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembanga n Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Kelembagaan Intelektual (HKI) Produk Unggulan Provinsi Jambi	2. Jumlah Buku Persyarat an IG		224	1 Buku Persyarat an IG	490	1 Buku Persyarat an IG	550	1 Buku Persyarat an IG	686	1 Buku Persyar atan IG	960	1 Buku Persyarat an IG	1.344	6 Buku Persyarat an IG	Balitbang da	
		3. Persent ase KTI dan Teknolo gi Tepat Guna		Pengembang an Inovasi dan Teknologi Daerah	3. Jumlah Inovasi teknologi yang dihasilkan		350.000	6 TTG 12 KTI	490.000	6 TTG 12 KTI	550.000	6 TTG 12 KTI	686.000	6 TTG 12 KTI	960.400	6 TTG 12 KTI	1.344	36 TTG 72 KTI	Balitbang da	

Program /Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasa ran	K od e	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab	Lokasi
							Tahun1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra SKPD			
							Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		(TTG) yang dihasilka n		Pengembang an Sentra Promosi IPTEK																
3.Meningkatny a publi kasi hasil penelitian	Meningkatn ya akses masyarakat terhadap informasi hasil Penelitian	Persentase hasil publi kasi yang mampu diakses masyarakat		Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembang an Penerbitan Jurnal Litbang	Jumlah Jurnal yang Terbit		250	3 kali terbit	300	3 kali terbit	350	3 kali terbit	392	3 kali terbit	548	3 kali terbit	768	18 kali terbit		



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021**

TENTANG

**INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah dilakukan penilaian terhadap laporan penerapan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengukuran Indeks Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penilaian Mandiri dan Validasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 Nomor 002.6/951/Pusida tanggal 29 Oktober 2021;
 2. Berita Acara Hasil Peninjauan Kembali Inovasi Daerah oleh Tim Penjamin Mutu Independen (Swakelola Tipe II) Nomor 0219/SMARTCITY/KEMENDAGRI.11/2021 tanggal 12 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021.

KESATU : Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam

Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology* (SMART CITY) Universitas Indonesia.

- KEDUA : Menetapkan Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 dengan kategori sangat inovatif, inovatif, kurang inovatif, dan tidak dapat dinilai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum



H. Heru Trihyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 002.6-5848 TAHUN 2021
TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2021

A. Kategori Provinsi

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Provinsi Sumatera Selatan	79.51	Sangat Inovatif
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	75.67	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Timur	63.15	Sangat Inovatif
4	Provinsi Jawa Barat	62.82	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Tengah	62.57	Sangat Inovatif
6	Provinsi Sumatera Barat	61.13	Sangat Inovatif
7	Provinsi Jambi	61.03	Sangat Inovatif
8	Provinsi Banten	60.52	Sangat Inovatif
9	Provinsi DKI Jakarta	58.68	Inovatif
10	Provinsi Bengkulu	57.93	Inovatif
11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	57.12	Inovatif
12	Provinsi Nusa Tenggara Timur	53.38	Inovatif
13	Provinsi Kalimantan Barat	52.74	Inovatif
14	Provinsi Gorontalo	50.42	Inovatif
15	Provinsi Lampung	50.18	Inovatif
16	Provinsi Sulawesi Tengah	49.57	Inovatif
17	Provinsi Papua	49.36	Inovatif
18	Provinsi Sulawesi Selatan	49.24	Inovatif
19	Provinsi Aceh	46.40	Inovatif
20	Provinsi Kalimantan Timur	44.19	Inovatif
21	Provinsi Sulawesi Utara	43.36	Inovatif
22	Provinsi Kepulauan Riau	42.10	Inovatif
23	Provinsi Papua Barat	40.64	Inovatif
24	Provinsi Kalimantan Utara	39.63	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
25	Provinsi Sumatera Utara	39.41	Inovatif
26	Provinsi Riau	38.82	Inovatif
27	Provinsi Kalimantan Selatan	36.72	Inovatif
28	Provinsi Sulawesi Barat	36.64	Inovatif
29	Provinsi Maluku	32.66	Inovatif
30	Provinsi DI Yogyakarta	30.41	Inovatif
31	Provinsi Bali	27.02	Kurang Inovatif
32	Provinsi Sulawesi Tenggara	25.26	Kurang Inovatif
33	Provinsi Maluku Utara	24.44	Kurang Inovatif
34	Provinsi Kalimantan Tengah	15.69	Kurang Inovatif

B. Kategori Kabupaten

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kabupaten Banyuwangi	84.19	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Wonogiri	75.51	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Bogor	72.46	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Muara Enim	62.97	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Lampung Barat	62.80	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Tabalong	62.78	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Indragiri Hilir	62.42	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Tanggamus	62.32	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Musi Rawas	62.10	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Tegal	62.06	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	61.83	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Bojonegoro	60.37	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Aceh Jaya	60.29	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Malang	60.20	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Sumedang	60.19	Sangat Inovatif
16	Kabupaten Situbondo	60.05	Sangat Inovatif
17	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	60.02	Sangat Inovatif
18	Kabupaten Deli Serdang	59.62	Inovatif
19	Kabupaten Bandung	59.52	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
20	Kabupaten Pulau Morotai	59.51	Inovatif
21	Kabupaten Kendal	59.43	Inovatif
22	Kabupaten Musi Banyuasin	59.32	Inovatif
23	Kabupaten Sampang	59.24	Inovatif
24	Kabupaten Banyu Asin	59.03	Inovatif
25	Kabupaten Klungkung	58.98	Inovatif
26	Kabupaten Bondowoso	58.57	Inovatif
27	Kabupaten Jombang	58.51	Inovatif
28	Kabupaten Sumba Timur	58.36	Inovatif
29	Kabupaten Boalemo	58.07	Inovatif
30	Kabupaten Lumajang	57.50	Inovatif
31	Kabupaten Sukabumi	57.49	Inovatif
32	Kabupaten Bangkalan	57.46	Inovatif
33	Kabupaten Sragen	57.23	Inovatif
34	Kabupaten Bone	57.15	Inovatif
35	Kabupaten Aceh Barat	56.88	Inovatif
36	Kabupaten Tuban	56.73	Inovatif
37	Kabupaten Kulon Progo	56.64	Inovatif
38	Kabupaten Kubu Raya	56.62	Inovatif
39	Kabupaten Blitar	56.58	Inovatif
40	Kabupaten Sambas	56.51	Inovatif
41	Kabupaten Lampung Tengah	56.47	Inovatif
42	Kabupaten Cirebon	56.29	Inovatif
43	Kabupaten Manggarai Barat	55.96	Inovatif
44	Kabupaten Pangandaran	55.84	Inovatif
45	Kabupaten Bintan	55.80	Inovatif
46	Kabupaten Semarang	55.80	Inovatif
47	Kabupaten Demak	55.56	Inovatif
48	Kabupaten Bantaeng	55.44	Inovatif
49	Kabupaten Trenggalek	55.28	Inovatif
50	Kabupaten Sanggau	55.01	Inovatif
51	Kabupaten Bangka Tengah	54.39	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
52	Kabupaten Ciamis	54.35	Inovatif
53	Kabupaten Pamekasan	54.35	Inovatif
54	Kabupaten Batanghari	54.28	Inovatif
55	Kabupaten Gunung Kidul	54.24	Inovatif
56	Kabupaten Ogan Komering Ilir	54.22	Inovatif
57	Kabupaten Maluku Tengah	54.20	Inovatif
58	Kabupaten Belu	54.04	Inovatif
59	Kabupaten Nabire	54.02	Inovatif
60	Kabupaten Banyumas	53.94	Inovatif
61	Kabupaten Nias Barat	53.88	Inovatif
62	Kabupaten Pati	53.81	Inovatif
63	Kabupaten Kotawaringin Barat	53.49	Inovatif
64	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	53.44	Inovatif
65	Kabupaten Sleman	53.42	Inovatif
66	Kabupaten Biak Numfor	53.36	Inovatif
67	Kabupaten Karo	53.24	Inovatif
68	Kabupaten Merauke	53.08	Inovatif
69	Kabupaten Sumba Barat Daya	52.81	Inovatif
70	Kabupaten Lampung Utara	52.80	Inovatif
71	Kabupaten Bireuen	52.76	Inovatif
72	Kabupaten Banggai	52.62	Inovatif
73	Kabupaten Bengkulu Utara	52.61	Inovatif
74	Kabupaten Cilacap	52.61	Inovatif
75	Kabupaten Seram Bagian Barat	52.56	Inovatif
76	Kabupaten Tanah Laut	52.42	Inovatif
77	Kabupaten Majalengka	52.35	Inovatif
78	Kabupaten Pekalongan	52.05	Inovatif
79	Kabupaten Way Kanan	52.05	Inovatif
80	Kabupaten Blora	51.36	Inovatif
81	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	51.29	Inovatif
82	Kabupaten Bangka	51.26	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
83	Kabupaten Bulungan	51.15	Inovatif
84	Kabupaten Buol	51.12	Inovatif
85	Kabupaten Humbang Hasundutan	51.09	Inovatif
86	Kabupaten Konawe Kepulauan	51.03	Inovatif
87	Kabupaten Pandeglang	50.83	Inovatif
88	Kabupaten Bone Bolango	50.72	Inovatif
89	Kabupaten Pesisir Barat	50.66	Inovatif
90	Kabupaten Purbalingga	50.62	Inovatif
91	Kabupaten Bengkulu Selatan	50.42	Inovatif
92	Kabupaten Purwakarta	50.38	Inovatif
93	Kabupaten Sumenep	50.38	Inovatif
94	Kabupaten Pringsewu	50.35	Inovatif
95	Kabupaten Halmahera Barat	50.20	Inovatif
96	Kabupaten Supiori	49.84	Inovatif
97	Kabupaten Bangka Selatan	49.68	Inovatif
98	Kabupaten Manggarai	49.63	Inovatif
99	Kabupaten Karanganyar	49.59	Inovatif
100	Kabupaten Samosir	49.57	Inovatif
101	Kabupaten Labuhanbatu	49.51	Inovatif
102	Kabupaten Lampung Selatan	49.48	Inovatif
103	Kabupaten Lamongan	49.34	Inovatif
104	Kabupaten Pesisir Selatan	49.34	Inovatif
105	Kabupaten Natuna	49.05	Inovatif
106	Kabupaten Boyolali	48.99	Inovatif
107	Kabupaten Tulang Bawang	48.88	Inovatif
108	Kabupaten Sekadau	48.84	Inovatif
109	Kabupaten Pesawaran	48.71	Inovatif
110	Kabupaten Banjar	48.62	Inovatif
111	Kabupaten Sidoarjo	48.55	Inovatif
112	Kabupaten Ketapang	48.52	Inovatif
113	Kabupaten Bengkalis	48.30	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
114	Kabupaten Dharman Raya	48.07	Inovatif
115	Kabupaten Takalar	48.07	Inovatif
116	Kabupaten Keerom	48.04	Inovatif
117	Kabupaten Manggarai Timur	48.02	Inovatif
118	Kabupaten Flores Timur	47.88	Inovatif
119	Kabupaten Rokan Hulu	47.64	Inovatif
120	Kabupaten Bandung Barat	47.39	Inovatif
121	Kabupaten Tana Tidung	47.38	Inovatif
122	Kabupaten Pelalawan	47.33	Inovatif
123	Kabupaten Bulukumba	47.32	Inovatif
124	Kabupaten Purworejo	47.32	Inovatif
125	Kabupaten Badung	47.12	Inovatif
126	Kabupaten Subang	47.05	Inovatif
127	Kabupaten Batang	46.84	Inovatif
128	Kabupaten Ngawi	46.75	Inovatif
129	Kabupaten Kotawaringin Timur	46.60	Inovatif
130	Kabupaten Jepara	46.52	Inovatif
131	Kabupaten Lebak	46.47	Inovatif
132	Kabupaten Madiun	46.44	Inovatif
133	Kabupaten Klaten	46.35	Inovatif
134	Kabupaten Magetan	46.09	Inovatif
135	Kabupaten Morowali	46.08	Inovatif
136	Kabupaten Kepahiang	46.00	Inovatif
137	Kabupaten Tasikmalaya	45.72	Inovatif
138	Kabupaten Agam	45.62	Inovatif
139	Kabupaten Temanggung	45.58	Inovatif
140	Kabupaten Jeneponto	45.49	Inovatif
141	Kabupaten Mojokerto	45.31	Inovatif
142	Kabupaten Seluma	45.05	Inovatif
143	Kabupaten Kerinci	45.02	Inovatif
144	Kabupaten Pacitan	44.88	Inovatif
145	Kabupaten Mandailing Natal	44.76	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
146	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	44.76	Inovatif
147	Kabupaten Parigi Moutong	44.70	Inovatif
148	Kabupaten Probolinggo	44.70	Inovatif
149	Kabupaten Tapin	44.68	Inovatif
150	Kabupaten Sukamara	44.67	Inovatif
151	Kabupaten Empat Lawang	44.45	Inovatif
152	Kabupaten Kediri	44.29	Inovatif
153	Kabupaten Rejang Lebong	44.07	Inovatif
154	Kabupaten Buru	44.05	Inovatif
155	Kabupaten Mesuji	43.80	Inovatif
156	Kabupaten Belitung	43.68	Inovatif
157	Kabupaten Sumbawa Barat	43.68	Inovatif
158	Kabupaten Buleleng	43.64	Inovatif
159	Kabupaten Ogan Ilir	43.59	Inovatif
160	Kabupaten Grobogan	43.35	Inovatif
161	Kabupaten Kebumen	43.23	Inovatif
162	Kabupaten Gresik	43.04	Inovatif
163	Kabupaten Sumbawa	42.96	Inovatif
164	Kabupaten Sinjai	42.82	Inovatif
165	Kabupaten Kampar	42.66	Inovatif
166	Kabupaten Balangan	42.62	Inovatif
167	Kabupaten Luwu Utara	42.60	Inovatif
168	Kabupaten Nias	42.52	Inovatif
169	Kabupaten Kudus	42.51	Inovatif
170	Kabupaten Paser	42.43	Inovatif
171	Kabupaten Aceh Barat Daya	42.36	Inovatif
172	Kabupaten Lampung Timur	42.06	Inovatif
173	Kabupaten Muna	42.02	Inovatif
174	Kabupaten Banjarnegara	41.91	Inovatif
175	Kabupaten Magelang	41.81	Inovatif
176	Kabupaten Wonosobo	41.73	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
177	Kabupaten Lahat	41.68	Inovatif
178	Kabupaten Sintang	41.57	Inovatif
179	Kabupaten Penajam Paser Utara	41.50	Inovatif
180	Kabupaten Indragiri Hulu	41.38	Inovatif
181	Kabupaten Kutai Kartanegara	41.38	Inovatif
182	Kabupaten Tanah Datar	41.21	Inovatif
183	Kabupaten Tangerang	41.16	Inovatif
184	Kabupaten Jayawijaya	41.10	Inovatif
185	Kabupaten Bantul	40.97	Inovatif
186	Kabupaten Sarolangun	40.89	Inovatif
187	Kabupaten Poso	40.78	Inovatif
188	Kabupaten Padang Pariaman	40.64	Inovatif
189	Kabupaten Pasaman	40.49	Inovatif
190	Kabupaten Minahasa Tenggara	40.29	Inovatif
191	Kabupaten Bombana	40.20	Inovatif
192	Kabupaten Jayapura	40.13	Inovatif
193	Kabupaten Garut	39.86	Inovatif
194	Kabupaten Batu Bara	39.74	Inovatif
195	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	39.14	Inovatif
196	Kabupaten Karawang	38.83	Inovatif
197	Kabupaten Pohuwato	38.76	Inovatif
198	Kabupaten Pinrang	38.72	Inovatif
199	Kabupaten Mamuju Tengah	38.41	Inovatif
200	Kabupaten Kolaka Utara	38.24	Inovatif
201	Kabupaten Sijunjung	38.13	Inovatif
202	Kabupaten Lombok Tengah	37.77	Inovatif
203	Kabupaten Jembrana	37.68	Inovatif
204	Kabupaten Toba	37.68	Inovatif
205	Kabupaten Timor Tengah Utara	37.56	Inovatif
206	Kabupaten Bengkulu Tengah	37.47	Inovatif
207	Kabupaten Mamasa	36.97	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
208	Kabupaten Anambas	36.95	Inovatif
209	Kabupaten Bengkayang	36.74	Inovatif
210	Kabupaten Bungo	36.64	Inovatif
211	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	36.59	Inovatif
212	Kabupaten Pasaman Barat	36.32	Inovatif
213	Kabupaten Solok	36.27	Inovatif
214	Kabupaten Kuningan	35.96	Inovatif
215	Kabupaten Tulang Bawang Barat	35.93	Inovatif
216	Kabupaten Polewali Mandar	35.91	Inovatif
217	Kabupaten Serang	35.77	Inovatif
218	Kabupaten Merangin	35.63	Inovatif
219	Kabupaten Soppeng	35.48	Inovatif
220	Kabupaten Kepulauan Meranti	35.47	Inovatif
221	Kabupaten Asahan	35.43	Inovatif
222	Kabupaten Tabanan	35.42	Inovatif
223	Kabupaten Lombok Timur	35.28	Inovatif
224	Kabupaten Belitung Timur	34.98	Inovatif
225	Kabupaten Rote Ndao	34.86	Inovatif
226	Kabupaten Tebo	34.63	Inovatif
227	Kabupaten Tana Toraja	34.25	Inovatif
228	Kabupaten Tulungagung	33.91	Inovatif
229	Kabupaten Barito Kuala	33.90	Inovatif
230	Kabupaten Ponorogo	33.84	Inovatif
231	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	33.76	Inovatif
232	Kabupaten Teluk Wondama	33.68	Inovatif
233	Kabupaten Pidie Jaya	33.47	Inovatif
234	Kabupaten Cianjur	33.32	Inovatif
235	Kabupaten Katingan	33.12	Inovatif
236	Kabupaten Sukoharjo	32.88	Inovatif
237	Kabupaten Buton Selatan	32.72	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
238	Kabupaten Lombok Utara	32.56	Inovatif
239	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32.53	Inovatif
240	Kabupaten Wajo	32.44	Inovatif
241	Kabupaten Pasangkayu	32.36	Inovatif
242	Kabupaten Rembang	32.20	Inovatif
243	Kabupaten Karimun	32.09	Inovatif
244	Kabupaten Kuantan Singingi	32.01	Inovatif
245	Kabupaten Barru	31.98	Inovatif
246	Kabupaten Lamandau	31.54	Inovatif
247	Kabupaten Banggai Kepulauan	31.48	Inovatif
248	Kabupaten Kolaka	31.30	Inovatif
249	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	30.60	Inovatif
250	Kabupaten Pemalang	30.32	Inovatif
251	Kabupaten Dompu	30.05	Inovatif
252	Kabupaten Sumba Tengah	29.88	Kurang Inovatif
253	Kabupaten Pakpak Bharat	29.70	Kurang Inovatif
254	Kabupaten Nunukan	29.35	Kurang Inovatif
255	Kabupaten Bangka Barat	29.24	Kurang Inovatif
256	Kabupaten Ogan Komering Ulu	29.19	Kurang Inovatif
257	Kabupaten Halmahera Tengah	29.15	Kurang Inovatif
258	Kabupaten Lima Puluh Kota	28.81	Kurang Inovatif
259	Kabupaten Melawi	28.22	Kurang Inovatif
260	Kabupaten Berau	27.34	Kurang Inovatif
261	Kabupaten Gorontalo	27.32	Kurang Inovatif
262	Kabupaten Hulu Sungai Utara	27.28	Kurang Inovatif
263	Kabupaten Kupang	27.08	Kurang Inovatif
264	Kabupaten Aceh Tengah	27.03	Kurang Inovatif
265	Kabupaten Serdang Bedagai	27.00	Kurang Inovatif
266	Kabupaten Manokwari Selatan	26.91	Kurang Inovatif
267	Kabupaten Labuhanbatu Utara	26.84	Kurang Inovatif
268	Kabupaten Kaimana	26.72	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
269	Kabupaten Kepulauan Selayar	26.46	Kurang Inovatif
270	Kabupaten Buton	26.10	Kurang Inovatif
271	Kabupaten Aceh Utara	25.54	Kurang Inovatif
272	Kabupaten Malinau	25.39	Kurang Inovatif
273	Kabupaten Majene	25.35	Kurang Inovatif
274	Kabupaten Aceh Tamiang	25.23	Kurang Inovatif
275	Kabupaten Gianyar	24.96	Kurang Inovatif
276	Kabupaten Lembata	24.17	Kurang Inovatif
277	Kabupaten Bekasi	23.92	Kurang Inovatif
278	Kabupaten Indramayu	23.91	Kurang Inovatif
279	Kabupaten Landak	23.65	Kurang Inovatif
280	Kabupaten Buton Tengah	23.48	Kurang Inovatif
281	Kabupaten Sikka	23.29	Kurang Inovatif
282	Kabupaten Lebong	22.69	Kurang Inovatif
283	Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	22.56	Kurang Inovatif
284	Kabupaten Gowa	22.53	Kurang Inovatif
285	Kabupaten Kapuas	22.53	Kurang Inovatif
286	Kabupaten Seruyan	22.29	Kurang Inovatif
287	Kabupaten Luwu Timur	22.28	Kurang Inovatif
288	Kabupaten Solok Selatan	22.24	Kurang Inovatif
289	Kabupaten Bener Meriah	21.61	Kurang Inovatif
290	Kabupaten Karang Asem	21.41	Kurang Inovatif
291	Kabupaten Siak	20.98	Kurang Inovatif
292	Kabupaten Murung Raya	20.59	Kurang Inovatif
293	Kabupaten Sigi	20.06	Kurang Inovatif
294	Kabupaten Lingga	19.64	Kurang Inovatif
295	Kabupaten Luwu	19.59	Kurang Inovatif
296	Kabupaten Pulang Pisau	19.57	Kurang Inovatif
297	Kabupaten Gayo Lues	18.99	Kurang Inovatif
298	Kabupaten Maluku Barat Daya	18.92	Kurang Inovatif
299	Kabupaten Dairi	18.52	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
300	Kabupaten Langkat	18.12	Kurang Inovatif
301	Kabupaten Wakatobi	17.84	Kurang Inovatif
302	Kabupaten Rokan Hilir	17.75	Kurang Inovatif
303	Kabupaten Nganjuk	17.60	Kurang Inovatif
304	Kabupaten Maros	16.48	Kurang Inovatif
305	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	16.44	Kurang Inovatif
306	Kabupaten Brebes	16.37	Kurang Inovatif
307	Kabupaten Barito Timur	16.17	Kurang Inovatif
308	Kabupaten Kepulauan Sangihe	15.88	Kurang Inovatif
309	Kabupaten Buton Utara	15.80	Kurang Inovatif
310	Kabupaten Tapanuli Utara	15.56	Kurang Inovatif
311	Kabupaten Kota Baru	15.20	Kurang Inovatif
312	Kabupaten Sabu Raijua	15.04	Kurang Inovatif
313	Kabupaten Nagan Raya	14.86	Kurang Inovatif
314	Kabupaten Tapanuli Selatan	14.32	Kurang Inovatif
315	Kabupaten Sidenreng Rappang	14.26	Kurang Inovatif
316	Kabupaten Pidie	13.92	Kurang Inovatif
317	Kabupaten Maluku Tenggara	13.69	Kurang Inovatif
318	Kabupaten Aceh Selatan	13.68	Kurang Inovatif
319	Kabupaten Musi Rawas Utara	13.44	Kurang Inovatif
320	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	13.36	Kurang Inovatif
321	Kabupaten Simeulue	13.29	Kurang Inovatif
322	Kabupaten Muna Barat	13.08	Kurang Inovatif
323	Kabupaten Aceh Timur	12.92	Kurang Inovatif
324	Kabupaten Lombok Barat	12.61	Kurang Inovatif
325	Kabupaten Kepulauan Talaud	12.56	Kurang Inovatif
326	Kabupaten Minahasa Selatan	12.48	Kurang Inovatif
327	Kabupaten Muaro Jambi	12.19	Kurang Inovatif
328	Kabupaten Mempawah	11.96	Kurang Inovatif
329	Kabupaten Nias Selatan	11.80	Kurang Inovatif
330	Kabupaten Mukomuko	11.76	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
331	Kabupaten Kaur	11.68	Kurang Inovatif
332	Kabupaten Mimika	11.56	Kurang Inovatif
333	Kabupaten Kepulauan Aru	11.40	Kurang Inovatif
334	Kabupaten Halmahera Selatan	11.32	Kurang Inovatif
335	Kabupaten Ngada	11.20	Kurang Inovatif
336	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	11.00	Kurang Inovatif
337	Kabupaten Halmahera Timur	10.80	Kurang Inovatif
338	Kabupaten Morowali Utara	10.76	Kurang Inovatif
339	Kabupaten Pasuruan	10.72	Kurang Inovatif
340	Kabupaten Bangli	10.56	Kurang Inovatif
341	Kabupaten Ende	10.40	Kurang Inovatif
342	Kabupaten Minahasa	9.88	Kurang Inovatif
343	Kabupaten Bima	9.68	Kurang Inovatif
344	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	9.44	Kurang Inovatif
345	Kabupaten Gunung Mas	9.40	Kurang Inovatif
346	Kabupaten Kapuas Hulu	9.20	Kurang Inovatif
347	Kabupaten Barito Utara	9.00	Kurang Inovatif
348	Kabupaten Kayong Utara	9.00	Kurang Inovatif
349	Kabupaten Padang Lawas Utara	8.40	Kurang Inovatif
350	Kabupaten Banggai Laut	8.00	Kurang Inovatif
351	Kabupaten Enrekang	7.96	Kurang Inovatif
352	Kabupaten Nias Utara	7.60	Kurang Inovatif
353	Kabupaten Bolaang Mongondow	7.28	Kurang Inovatif
354	Kabupaten Buru Selatan	7.00	Kurang Inovatif
355	Kabupaten Tojo Una-Una	6.96	Kurang Inovatif
356	Kabupaten Teluk Bintuni	6.80	Kurang Inovatif
357	Kabupaten Aceh Besar	6.76	Kurang Inovatif
358	Kabupaten Konawe Selatan	6.60	Kurang Inovatif
359	Kabupaten Halmahera Utara	6.48	Kurang Inovatif
360	Kabupaten Minahasa Utara	6.16	Kurang Inovatif
361	Kabupaten Malaka	5.60	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
362	Kabupaten Jember	5.56	Kurang Inovatif
363	Kabupaten Tanah Bumbu	5.48	Kurang Inovatif
364	Kabupaten Tolikara	5.28	Kurang Inovatif
365	Kabupaten Padang Lawas	5.20	Kurang Inovatif
366	Kabupaten Aceh Singkil	4.52	Kurang Inovatif
367	Kabupaten Tapanuli Tengah	4.16	Kurang Inovatif
368	Kabupaten Kepulauan Sula	3.68	Kurang Inovatif
369	Kabupaten Pegunungan Bintang	3.68	Kurang Inovatif
370	Kabupaten Nduga	3.60	Kurang Inovatif
371	Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.56	Kurang Inovatif
372	Kabupaten Alor	3.20	Kurang Inovatif
373	Kabupaten Boven Digoel	3.20	Kurang Inovatif
374	Kabupaten Kolaka Timur	3.20	Kurang Inovatif
375	Kabupaten Kutai Barat	3.04	Kurang Inovatif
376	Kabupaten Nagekeo	2.80	Kurang Inovatif
377	Kabupaten Paniai	2.00	Kurang Inovatif
378	Kabupaten Aceh Tenggara	1.30	Kurang Inovatif
379	Kabupaten Seram Bagian Timur	1.28	Kurang Inovatif
380	Kabupaten Toraja Utara	1.04	Kurang Inovatif
381	Kabupaten Sumba Barat	0.80	Kurang Inovatif
382	Kabupaten Barito Selatan	0.56	Kurang Inovatif
383	Kabupaten Kutai Timur	0.56	Kurang Inovatif
384	Kabupaten Asmat	0.40	Kurang Inovatif
385	Kabupaten Donggala	0.40	Kurang Inovatif
386	Kabupaten Konawe Utara	0.40	Kurang Inovatif
387	Kabupaten Pulau Taliabu	0.40	Kurang Inovatif
388	Kabupaten Mamuju	0.08	Kurang Inovatif
389	Kabupaten Manokwari	0.08	Kurang Inovatif
390	Kabupaten Raja Ampat	0.08	Kurang Inovatif
391	Kabupaten Simalungun	0.08	Kurang Inovatif
392	Kabupaten Toli-Toli	0.08	Kurang Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
393	Kabupaten Deiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
394	Kabupaten Dogiyai	0.00	Tidak Dapat Dinilai
395	Kabupaten Fak Fak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
396	Kabupaten Gorontalo Utara	0.00	Tidak Dapat Dinilai
397	Kabupaten Intan Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
398	Kabupaten Kepulauan Yapen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
399	Kabupaten Konawe	0.00	Tidak Dapat Dinilai
400	Kabupaten Lanny Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
401	Kabupaten Mahakam Ulu	0.00	Tidak Dapat Dinilai
402	Kabupaten Mamberamo Raya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
403	Kabupaten Mamberamo Tengah	0.00	Tidak Dapat Dinilai
404	Kabupaten Mappi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
405	Kabupaten Maybrat	0.00	Tidak Dapat Dinilai
406	Kabupaten Pegunungan Arfak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
407	Kabupaten Puncak	0.00	Tidak Dapat Dinilai
408	Kabupaten Puncak Jaya	0.00	Tidak Dapat Dinilai
409	Kabupaten Sarmi	0.00	Tidak Dapat Dinilai
410	Kabupaten Sorong	0.00	Tidak Dapat Dinilai
411	Kabupaten Sorong Selatan	0.00	Tidak Dapat Dinilai
412	Kabupaten Tambrauw	0.00	Tidak Dapat Dinilai
413	Kabupaten Waropen	0.00	Tidak Dapat Dinilai
414	Kabupaten Yahukimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai
415	Kabupaten Yalimo	0.00	Tidak Dapat Dinilai

C. Kategori Kota

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
1	Kota Singkawang	70.63	Sangat Inovatif
2	Kota Surabaya	64.70	Sangat Inovatif
3	Kota Padang Panjang	64.08	Sangat Inovatif
4	Kota Cimahi	63.76	Sangat Inovatif
5	Kota Yogyakarta	63.29	Sangat Inovatif
6	Kota Tangerang	62.70	Sangat Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
7	Kota Mojokerto	62.30	Sangat Inovatif
8	Kota Probolinggo	61.51	Sangat Inovatif
9	Kota Piaman	61.22	Sangat Inovatif
10	Kota Bandung	60.29	Sangat Inovatif
11	Kota Pekanbaru	60.14	Sangat Inovatif
12	Kota Makassar	60.10	Sangat Inovatif
13	Kota Bitung	59.47	Inovatif
14	Kota Bengkulu	59.37	Inovatif
15	Kota Pangkal Pinang	59.02	Inovatif
16	Kota Jambi	58.98	Inovatif
17	Kota Manado	58.96	Inovatif
18	Kota Bogor	57.80	Inovatif
19	Kota Surakarta	57.73	Inovatif
20	Kota Semarang	57.49	Inovatif
21	Kota Bontang	56.12	Inovatif
22	Kota Pontianak	56.10	Inovatif
23	Kota Pagar Alam	56.06	Inovatif
24	Kota Sukabumi	55.46	Inovatif
25	Kota Denpasar	55.22	Inovatif
26	Kota Palembang	55.19	Inovatif
27	Kota Kediri	55.03	Inovatif
28	Kota Kendari	54.04	Inovatif
29	Kota Blitar	53.21	Inovatif
30	Kota Mataram	53.17	Inovatif
31	Kota Madiun	52.99	Inovatif
32	Kota Samarinda	52.71	Inovatif
33	Kota Magelang	52.36	Inovatif
34	Kota Palu	52.16	Inovatif
35	Kota Payakumbuh	51.99	Inovatif
36	Kota Malang	51.88	Inovatif
37	Kota Bekasi	51.74	Inovatif
38	Kota Tangerang Selatan	51.66	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
39	Kota Tanjung Pinang	50.90	Inovatif
40	Kota Bandar Lampung	50.77	Inovatif
41	Kota Lubuklinggau	50.57	Inovatif
42	Kota Metro	49.81	Inovatif
43	Kota Serang	49.71	Inovatif
44	Kota Pare-Pare	49.63	Inovatif
45	Kota Bima	48.37	Inovatif
46	Kota Ternate	48.36	Inovatif
47	Kota Gunungsitoli	47.61	Inovatif
48	Kota Padang	47.44	Inovatif
49	Kota Kupang	47.34	Inovatif
50	Kota Jayapura	46.89	Inovatif
51	Kota Banjar	46.28	Inovatif
52	Kota Salatiga	46.28	Inovatif
53	Kota Pekalongan	44.72	Inovatif
54	Kota Sawah Lunto	44.64	Inovatif
55	Kota Gorontalo	44.36	Inovatif
56	Kota Langsa	44.28	Inovatif
57	Kota Cirebon	43.47	Inovatif
58	Kota Depok	41.52	Inovatif
59	Kota Balikpapan	39.20	Inovatif
60	Kota Prabumulih	38.51	Inovatif
61	Kota Banjarmasin	37.85	Inovatif
62	Kota Pematang Siantar	37.77	Inovatif
63	Kota Batam	37.33	Inovatif
64	Kota Tasikmalaya	36.43	Inovatif
65	Kota Tegal	33.87	Inovatif
66	Kota Padangsidimpuan	33.64	Inovatif
67	Kota Solok	33.36	Inovatif
68	Kota Tebing Tinggi	32.94	Inovatif
69	Kota Kotamobagu	31.99	Inovatif
70	Kota Subulussalam	31.44	Inovatif

No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
71	Kota Tarakan	30.73	Inovatif
72	Kota Palangka Raya	30.37	Inovatif
73	Kota Medan	27.98	Kurang Inovatif
74	Kota Palopo	26.67	Kurang Inovatif
75	Kota Batu	24.46	Kurang Inovatif
76	Kota Sabang	24.16	Kurang Inovatif
77	Kota Banda Aceh	22.52	Kurang Inovatif
78	Kota Dumai	20.48	Kurang Inovatif
79	Kota Bukittinggi	18.51	Kurang Inovatif
80	Kota Cilegon	17.68	Kurang Inovatif
81	Kota Banjarbaru	16.71	Kurang Inovatif
82	Kota Lhokseumawe	16.52	Kurang Inovatif
83	Kota Pasuruan	13.60	Kurang Inovatif
84	Kota Tanjung Balai	12.36	Kurang Inovatif
85	Kota Tual	11.00	Kurang Inovatif
86	Kota Tidore Kepulauan	10.60	Kurang Inovatif
87	Kota Ambon	10.08	Kurang Inovatif
88	Kota Sungai Penuh	8.88	Kurang Inovatif
89	Kota Bau-Bau	8.84	Kurang Inovatif
90	Kota Tomohon	8.64	Kurang Inovatif
91	Kota Sibolga	6.30	Kurang Inovatif
92	Kota Binjai	0.48	Kurang Inovatif
93	Kota Sorong	0.08	Kurang Inovatif

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003



Lampiran 6.

**LAPORAN
PEMETAAN EKOSISTEM INOVASI
MELALUI INDEK DAYA SAING DAERAH
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**



KATA SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Provinsi Jambi dapat mengikuti Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui pengisian kuisioner Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan selesainya pengisian kuisioner Indeks Daya Saing Daerah ini mempunyai arti yang sangat penting dan strategis, dalam perjalanan pembangunan Provinsi Jambi kedepannya sesuai dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Pada fase ini, fokus pembangunan di arahkan pada: *pertama*, memantapkan tata kelola pemerintahan. *Kedua*, memantapkan perekonomian masyarakat dan daerah serta *ketiga* memantapkan kualitas sumberdaya manusia. *Ketiga* fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi konsisten menuju terwujudnya Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT.

Harapan Saya dengan terukurnya indeks daya saing daerah program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dapat lebih terarah dan menyentuh langsung dengan daerah. Mudah-mudahan dengan memperhatikan hal-hal pokok ini, daya saing daerah Jambi akan semakin meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SEKRETARIS DAERAH,

H. SUDIRMAN, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19680109 199203 1002

KATA PENGANTAR

KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI

Kami bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dengan berhasil dirampungkannya laporan pelaksanaan Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun materinya. Ketidaksempurnaan ini juga terkait berbagai kesulitan dan kendala yang dihadapi oleh Tim Penulis baik dari segi waktu maupun pengumpulan data dan informasi di saat pandemi Covid-19 pada tahun ini. Akan tetapi apresiasi kepada TIM Pemetaan Ekosistem Inovasi/IDSD Provinsi Jambi dengan semangat dan antusias tinggi berhasil menyelesaikan tugas dalam berpartisipasi mengikuti pelaksanaan pengisian kuisioner Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi tahun 2021. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.

Demikian, Terima kasih.

KEPALA BADAN,

Ir. A Z R I N, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19660224 199203 1 002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH PROV. JAMBI	ii
KATA PENGANTAR KEPALA BALITBANGDA PROVINSI JAMBI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. KEADAAN TERKINI	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pemetaan Sektor Andalan	4
II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	5
2.1 Formulasi Kebijakan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jambi.	5
2.2 Terobosan Strategi Melalui Perencanaan Berbasis Penelitian, dan Pembangunan Berbasis Perencanaan.	6
III. SOLUSI MENYELURUH	7
3.1 Agenda Kerjasama dan Kolaborasi.	7
3.2 Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan IDSD;.....	7
3.3 Konektivitas Antar Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan.	8
IV. TATA KELOLA DAN DUKUNGAN.....	8
4.1 Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah	8
4.2 Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi.	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021	4
--	---

I. KEADAAN TERKINI

1.1 Pendahuluan

Secara geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0° 74'– 20 46,16' Lintang Selatan dan 1010 12' – 1040 44' Bujur Timur. Provinsi Jambi terletak pada Bagian Tengah Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Karimata dan Selat Berhala serta berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan lalu lintas internasional. Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (*Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle*).

Sejak mulai terbentuknya Provinsi Jambi hingga saat ini telah banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai yang merupakan fondasi dalam pembangunan Provinsi Jambi terutama dalam membangun ekonomi daerah untuk mengembangkan perekonomian yang lebih sejahtera dimasa mendatang.

Mewabahnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkat secara signifikan. Dampak negatif terhadap keadaan sosial-ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. Tidak berbeda halnya di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam memperkuat berbagai program perlindungan sosial dampingan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19. Program-program perlindungan sosial ini telah diperluas untuk melindungi masyarakat miskin terhadap guncangan ekonomi, dan juga masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang jumlahnya terus meningkat namun menjadi rentan terhadap risiko jatuh miskin di kemudian hari. Selain itu, usaha-usaha kecil juga menerima bantuan pemerintah seiring

dengan upaya mereka untuk terus bertahan di tengah penurunan perekonomian dan pembatasan kegiatan masyarakat setelah pandemi COVID-19.

Pasca Pandemi Covid-19 tahun 2020, Provinsi Jambi mulai melakukan pembenahan-pembenahan hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2021 yang mengalami kontraksi 0,33% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0,99% (yoy), namun masih berada di bawah pertumbuhan triwulan I tahun 2020 sebesar 1,97% (yoy). Penurunan kinerja ekonomi masih disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang belum pulih sepenuhnya memasuki *new normal*. Meskipun berbagai negara sempat melonggarkan kebijakan *lockdown* atau pembatasan sosial, peningkatan risiko gelombang baru COVID-19 akibat mutasi virus mengakibatkan sejumlah negara kembali menerapkan kebijakan *lockdown* atau pembatasan sosial secara ketat sehingga menahan pemulihan perdagangan global dan mobilitas masyarakat (Bank Indonesia Perwakilan Jambi, 2021).

Penurunan kinerja ekonomi daerah terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha (LU). Sejalan dengan lambatnya pemulihan ekonomi global dan domestik, permintaan komoditas energi primer mengalami dampak yang paling besar disebabkan oleh permintaan yang masih relatif terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan LU pertanian, LU konstruksi serta LU *real estate* terpantau membaik pada triwulan I Tahun 2021.

Dari sisi pengeluaran, perkembangan PDRB Provinsi Jambi pada triwulan I Tahun 2021 menurun disebabkan kontraksi ekspor ditengah perbaikan kinerja komponen penggunaan lainnya. Berdasarkan strukturnya, pertumbuhan ekonomi masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan LNPRRT dengan pangsa sebesar 47,87%. Selanjutnya, diikuti oleh pembentukan modal tetap domestik bruto 23,37%, net ekspor sebesar 21,83%, konsumsi pemerintah sebesar 4,10% dan perubahan inventori sebesar 2,83%. Menurunnya kinerja pengeluaran sejalan dengan menurunnya kinerja beberapa LU seperti perdagangan dan lain-lain yang merupakan dampak pandemi COVID-19.

Sementara itu, laju inflasi triwulan I Tahun 2021 tercatat 2,65% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,01% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 1,37% (yoy). Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,7% (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 2,17% (yoy). kenaikan tersebut disebabkan pasokan yang terbatas akibat berakhirnya masa panen raya dan dampak dari La-Nina yang mengakibatkan curah hujan tinggi sehingga, produksi komoditas hortikultura tidak optimal.

Selanjutnya, penyaluran kredit perbankan di Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2021 mencapai Rp.43,02 triliun atau tumbuh 7,32% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,06% (yoy). Peningkatan tersebut disertai dengan perbaikan kualitas kredit. Rasio Non Performing Loan turun dari 2,55% (gross) pada triwulan IV 2020 menjadi 2,21% (gross) di triwulan laporan. Dari sisi penghimpunan dana, DPK perbankan pada triwulan I tahun 2021 tercatat Rp39,17 triliun atau tumbuh 14,18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 14,02% (yoy).

Perkembangan pembayaran tunai di Provinsi Jambi pada triwulan I tahun 2021 menunjukkan *net inflow* sebesar Rp1,05 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp3,74 triliun. Penurunan *net inflow* tersebut diindikasikan terjadi karena telah berakhirnya liburan Natal dan Tahun Baru 2020 yang merupakan salah satu periode *outflow* terbesar di Indonesia.

Tingkat Pengangguran Terbuka naik dari 4,26% pada Februari tahun 2020 menjadi 4,76% di Februari tahun 2021. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan jumlah penduduk bekerja. Namun demikian, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tercatat meningkat menjadi 67,30% dibandingkan Februari tahun 2020 sebesar 67,28%. Sementara, indeks Nilai Tukar Petani menunjukkan peningkatan pada triwulan I tahun 2021 menjadi 122,17 dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 115,42. Perbaikan Nilai Tukar Petani didorong peningkatan indeks yang diterima ditengah penurunan indeks yang dibayar petani. Selain itu, aspek kemiskinan mengalami peningkatan pada September tahun 2020. Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi pada September tahun 2020 sebesar 7,97%, meningkat dibandingkan September tahun 2019 sebesar 7,51%. Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga menunjukkan kenaikan pada angka pada September 2020.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh positif pada kisaran 2,64% - 3,04% (yoy) dan menguat dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut didorong pulihnya perekonomian global dan domestik pasca pandemi COVID-19. Relaksasi pembatasan sosial seiring implementasi vaksin dan penanganan COVID-19 yang semakin baik akan mendorong normalisasi mobilitas manusia dan barang, yang kemudian meningkatkan permintaan domestik serta aktivitas produksi.

Selanjutnya, tekanan inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2021 diperkirakan relatif stabil. Tekanan inflasi tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh meredanya wabah COVID-19 yang berdampak terhadap normalisasi pola konsumsi masyarakat secara

keseluruhan. Tekanan inflasi tahun 2021 terutama akan bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Terdapat beberapa risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi lebih tinggi dari perkiraan. Tekanan inflasi sub kelompok rokok dan tembakau meningkat seiring dengan kenaikan tarif cukai tembakau sejak awal tahun 2020. Selanjutnya, kenaikan beberapa komoditas global serta harga komoditas energi primer dapat memengaruhi harga komoditas domestik serta pergeseran pola tanam serta periode HBKN yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya juga dapat menyebabkan inflasi bahan makanan karena adanya *gap* permintaan dan penawaran.

Dampak dari pandemi COVID-19 akan terus dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat selama tahun 2021 di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, ketanggapan perlu diteruskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi.

1.2 Pemetaan Sektor Andalan

Pembangunan Provinsi Jambi, tidak terlepas dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021, yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 71 ayat (2). Sesuai dengan aturan tersebut maka dimuat visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penetapan dan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun visi yang diemban seperti meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi, serta kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan.



Gambar 1 Hasil Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021

Di lihat pada gambar 1, hasil pemetaan Indeks Daya Saing Provinsi Jambi Tahun 2021 oleh BRIN berdasarkan aspek indeks tertinggi pada aspek sumber daya manusia (2.25) dan terendah pada aspek penguat / *Enabling Environment* (2.87). Sementara berdasarkan pilar, dari 12 pilar dimensi yang di ukur, dimensi ketenagakerjaan memiliki nilai indeks tertinggi dibandingkan dengan ke 11 (sebelas) dimensi lainnya yakni 4.50, yang masih sama dengan tahun sebelumnya (2020) nilai ini tidak mengalami perubahan artinya Pemerintah Provinsi Jambi mampu mempertahankan dan menstabilkan angka dimensi Ketenagakerjaan. Sementara untuk nilai terendah berada pada dimensi ukuran pasar yakni 0.33, nilai ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yang berada pada nilai indeks 2.33. Dari hasil penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedepan potensi unggulan daya saing daerah Provinsi Jambi berada pada aspek sumberdaya manusia dengan pilar ketenagakerjaan dan efisiensi pasar produk dan kesiapan teknologi menjadi program unggulan utama yang menjadi perhatian pemerintah. Namun Pemerintah Provinsi Jambi perlu kiranya memperhatikan lebih potensi lain yang masih lemah seperti sektor pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19.

II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1 Formulasi Kebijakan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jambi.

Terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024 menjadi momentum perubahan dimasa pandemi COVID-19. Dengan Visi JAMBI MANTAP (Jambi yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT), dan Misi Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah Serta Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Melalui visi dan misi ini formulasi kebijakan peningkatan IPTEKIN terangkum secara utuh dalam tiap tahapan misi, terutama dalam memantapkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah kebijakan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi berdasarkan Kebijakan dan Strategi daerah ilmu pengetahuan dan teknologi adalah :

- a) Mempertajam prioritas penelitian lembaga penelitian sesuai dengan kebutuhan dan agenda pembangunan daerah menuju JAMBI MANTAP 2024.

- b) Meningkatkan publikasi dan diseminasi hasil penelitian serta memperkuat jaringan komunikasi antara lembaga penelitian pengembangan dengan dunia usaha.
- c) Menumbuhkan kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat.
- d) Meningkatkan koordinasi antar lembaga penelitian untuk pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian.
- e) Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan.

2.2 Terobosan Strategi Melalui Perencanaan Berbasis Penelitian, dan Pembangunan Berbasis Perencanaan.

Beberapa terobosan strategi penelitian dan pengembangan pembangunan yang berbasis perencanaan berdasarkan prioritas dan unggulan pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Program penyusunan direktori hasil-hasil penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program ini yaitu : (1) untuk menghindari tumpang tindih kegiatan penelitian. Terbatasnya diseminasi hasil penelitian yang pernah dilakukan sebagai akibat keterbatasan dana yang tersedia. Persoalan ini akan memberi peluang besar untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, (2) menjaga keberlanjutan kegiatan penelitian. Berkelanjutan kegiatan penelitian ini sangat dimungkinkan berdasarkan hasil penelitian yang masih bersifat umum (awal). Keberlanjutan ini tentu akan menjurus kepada besarnya peluang hasil penelitian untuk digunakan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. Program penelitian menunjang pemerintahan dan pembangunan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga penelitian pengembangan dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan bagi pemerintahan dan pembangunan, serta meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap efisiensi, produktivitas, dan nilai tambah proses usaha kecil menengah.
- c. Program diseminasi ilmu pengetahuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan publikasi dan diseminasi hasil penelitian, memperkuat jaringan komunikasi antar lembaga penelitian dengan dunia usaha, dan meningkatkan budaya ilmu

pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

- d. Program penguatan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga penelitian dan pengembangan di Provinsi Jambi, meningkatkan ketertiban tenaga pakar dalam berbagai bidang ilmu untuk memecahkan masalah aktual bidang pemerintahan dan pembangunan, dan meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan.

III. SOLUSI MENYELURUH

3.1 Agenda Kerjasama dan Kolaborasi.

Untuk meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi misi pembangunan Provinsi Jambi yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN), Provinsi Jambi telah berupaya untuk mengeluarkan agenda kebijakan kerjasama dan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan sektor swasta yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 seperti: 1) Kerjasama institusi bisnis yang berbasis IPTEKIN dan Entrepreneur; 2) Pengembangan kerjasama antar BUMD yang saling menguntungkan; 3) Meningkatkan kerjasama dengan swasta guna penyaluran tenaga kerja dengan mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asal Jambi; 4) Mengembangkan minimal satu komoditas untuk mendukung penguatan SIDA di Provinsi Jambi melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten, BPTP Jambi dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

3.2 Prioritas Program Penyusunan dan Pelaksanaan Penguatan IDSD;

Dalam pelaksanaan prioritas penguatan program daya saing daerah kedepan, penguatan program peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang masih belum baik dan berdampak pada pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sebanding dengan perubahan penggunaan lahan dan emisi yang dihasilkan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi belum optimal masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Kesenjangan ini bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat.

Kesenjangan pembangunan perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya permasalahan lainnya terutama pasca Pandemi Covid-19, yang pada

gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial. Kondisi ini tergambar dari Visi Jambi Mantap 2024 yang menghendaki terwujudnya Jambi maju, anam, nyamanm, tertib, amanmah dan profesional. Untuk mewujudkan visi pembangunan, program ini disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam tahun 2021 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada tahun 2024, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun selanjutnya.

3.3 Konektivitas Antar Kelembagaan dan Kewenangan Pemerintahan.

Konektivitas antar organisasi perangkat daerah dan kewenangannya di Provinsi Jambi telah ditur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Serta keputusan gubernur Jambi nomor 578/Kep.Gub/Balitbangda-5.2/V/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi daerah (SIDa) Provinsi Jambi, serta Peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah.

IV. TATA KELOLA DAN DUKUNGAN

4.1 Agenda Kerja Pelaksanaan Penguatan Daya Saing Daerah

Salah satu agenda kerja pemerintah dalam penguatan daya saing daerah melalui pemanfaatan inovasi di daerah adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kinerja perangkat daerah melalui penguatan inovasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Agenda ini didukung dengan hadirnya Peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah yang pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa Setiap satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi setiap tahun wajib mengusulkan Inisiatif Inovasi yang terkait dengan bidang tugas Perangkat Daerah tersebut.

4.2 Anggaran, Kelembagaan dan SDM, Inovasi.

Hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah menjadi landasah hukum penyelenggaraan Inovasi di daerah. Optimalisasi anggaran pembangunan daerah melalui berbagai program/kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta upaya mendorong implementasi inovasi di berbagai sektor pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah kedepan akan lebih terealisasi dengan adanya berbagai

kegiatan seperti lomba Inovasi Daerah oleh OPD serta lomba inovasi produksi oleh masyarakat melalui alokasi dana APBD dan dana lain yang tidak mengikat termasuk dengan melibatkan perusahaan swasta dalam berkontribusi meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek ekosistem Inovasi di Provinsi Jambi memiliki nilai indeks tertinggi (3,28) nilai ini berbanding lurus dengan hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2019 yang menempatkan Provinsi Jambi pada urutan 10 besar dengan nilai 9580 kategori sangat inovatif.

Dari sisi kelembagaan, bentuk komitmen pemerintah provinsi jambi dengan membuat satu bidang khusus yakni bidang inovasi daerah yang nomenklaturnya mengacu pada PP nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah pada satuan kerja Balitbangda Provinsi Jambi. Dengan terbentuknya kelembagaan ini, maka secara otomatis nantinya diharapkan kebijakan penganggaran dan peningkatan SDM serta pola pelayanan pemerintah berbasis inovasi menuju daya saing daerah yang semakin maju.

Lampiran 7. Hasil-hasil Penelitian Balitbangda Provinsi Jambi Tahun 2021

1. **Produktivitas dan Efisiensi Perangkat Daerah Implementasi Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 (*Studi Kasus Pada 6 OPD Pemerintah Provinsi Jambi*)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas dan efisiensi OPD pada Pemerintah Provinsi Jambi khususnya pada eselon 4 (empat) atau jabatan Administrator, kesesuaian jumlah pegawai dalam mewujudkan produktivitas dan efisiensi OPD serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas ASN eselon IV di Pemerintah Provinsi Jambi pada 6 (enam) OPD di Pemerintah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Terdapat seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Keuangan Daerah memiliki jam kerja tidak produktif dan efisien, maka implikasi kebijakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 yang menyatakan apabila terdapat seksi yang memiliki jam kerja tidak produktif dengan ketentuan dibawah 700 jam atau 56%, maka seksi tersebut dapat digabungkan ke seksi yang memiliki unit kerja sejenis atau berdekatan fungsinya. Selain penggabungan cara lain yang dapat dilakukan Dinas atau Badan bersangkutan dapat menambah kembali program kerja seksi tersebut sehingga memiliki jam kerja diatas 700 jam atau 56%.
- Adanya ketidaksesuaian penempatan jumlah pegawai dengan beban kerja, maka implikasi kebijakannya adalah mengatur kembali penempatan jumlah pegawai yang disesuaikan dengan beban kerja.
- Bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Badan Keuangan Daerah yang memiliki beban kerja terlalu besar dengan tanggung jawab pengawasan yang besar maka implikasi kebijakan dinas atau badan tersebut dapat dilakukan restrukturisasi kembali yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi.
- Bagi Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki struktur organisasi yang produktif dan efisien maka dinas tersebut dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah ditentukan. Namun Beberapa Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, memiliki kesamaan kegiatan dengan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan serta Tupoksi yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

2. **Model Kesiapan Satuan Pendidikan dalam Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada SMA/SMK Di Provinsi Jambi**

Tujuan penelitian ini untuk menentukan kesiapan dari level siswa, guru dan kepala sekolah serta kesiapan sarana prasarana pada tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan merumuskan **model kesiapan satuan pendidikan pada level SLTA di Provinsi Jambi** dalam penyelenggaraan PTM pada era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan, beberapa implikasi dan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Faktor kesiapan perilaku siswa dalam pencegahan dan penularan Covid-19 yang baik sebagai implementasi Adaptasi Kebiasaan Baru di SLTA dalam Provinsi Jambi ditemukan sebagian besar (66,70%) siswa telah berperilaku yang baik. Adapun **model determinan perilaku siswa SLTA di Provinsi Jambi** dalam penerapan protokol kesehatan meliputi 4 faktor : (1) kemudahan pelaksanaan protokol kesehatan memberikan peluang sebesar 3,3 kali siswanya untuk melaksanakan protokol kesehatan; (2) kesiapan sekolah memberikan peluang 3,2 kali; (3) tingkat pengetahuan siswa 1,86 kali; (4) riwayat vaksinasi 1,84 kali; dan (5) kesiapan guru sebesar 1,69 kali.
- Faktor kesiapan pada kelompok guru dan kepala sekolah terkait penerapan AKB ditemukan bahwa guru dan kepala sekolah telah siap dalam mendukung keberhasilan

penerapan protokol kesehatan. Perilaku guru dan kepala sekolah telah menunjukkan perilaku yang baik namun harus ditingkatkan pada kedisiplinan membawa peralatan kebutuhan pribadi, dan perilaku ketika telah sampai di rumah. Masa pandemi dirasa memberi dampak penambahan beban kerja guru baik dari sisi waktu, tenaga dan finansial dengan metode pembelajaran berbasis online. Selain itu, dirasakan terdapat hambatan dalam memberikan pemahaman dengan mudah kepada peserta didik.

- Faktor kesiapan sarana prasarana sekolah terkait pelaksanaan protokol kesehatan adalah sebagian besar sudah tersedia namun masih harus ditingkatkan terutama pada ketersediaan air bersih dan mengalir, masker cadangan, hand sanitiser, label jaga jarak baik di kelas/ruangan lain maupun di lingkungan sekolah serta data terkait kondisi kesehatan warga sekolah yang sebagian besar belum disiapkan oleh sekolah.
- Pemerintah Daerah perlu mendorong menciptakan **Digital Smart School** sebagai model pendidikan jarak jauh, dalam mengatasi dampak pembelajaran apabila terjadi pandemi kedepannya. Dalam menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru Dinas Pendidikan perlu melakukan penguatan kelembagaan sekolah melalui pola kemitraan meliputi unsur kewilayahan (pemerintahan dan masyarakat), unsur PTN/PTS. Dinas Pendidikan harus mendorong Pihak sekolah untuk dapat melengkapi ketersediaan dan kecukupan sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah serta lebih efektif dalam mengatur tata letak sarana prasarana tersebut sehingga lebih memudahkan warga satuan pendidikan untuk melaksanakan protokol kesehatan.
- Pihak sekolah agar melaksanakan Standar Operasional Prosedure (SOP) sesuai standar pencegahan penularan Covid-19 yang telah ada seperti; SOP Masuk Lingkungan Sekolah, SOP KBM, SOP Pelayanan Perpustakaan, SOP Pelayanan Tata Usaha, SOP Keadaan Darurat, SOP Rapat. Selain itu Pihak sekolah agar lebih mendorong siswa untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam upaya peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi/simulasi terkait perkembangan terbaru Covid-19 yang dapat menjangkau tidak hanya warga satuan pendidikan disekolah namun juga masyarakat luas.

3. Keberlanjutan Kinerja UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 di Provinsi Jambi (*Perspektif Pola Pikir, Kemampuan dan Motivasi Pelaku Usaha UMKM*)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. menganalisis eksisting pola pikir, kemampuan, motivasi dan keberlanjutan kinerja UMKM di Provinsi Jambi; b. menganalisis pengaruh pola pikir dan kemampuan usaha terhadap keberlanjutan kinerja UMKM; c. menganalisis motivasi sebagai variabel mediasi; dan d. Menentukan strategi keberlanjutan UMKM di Provinsi Jambi.

- Beberapa UMKM belum menggunakan digitalisasi dan penjualan produk masih dengan cara konvensional, maka implikasi kebijakan untuk meningkatkan kompetensi digitalisasi diperlukan:
 - a. Program pelatihan dan pembinaan UMKM yang tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, Kota dan Kabupaten melalui Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindag, namun juga dilakukan oleh lembaga lain seperti Bank Indonesia dengan program unggulannya, Pertamina yang memiliki program UMKM setingkat lebih cerdas, Petro Cina yang memiliki program pemberdayaan UMKM, Indomaret melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan daya saing UMKM melalui inovasi dan kreativitas dan Alfamart melakukan pelatihan tentang manajemen ritel dan bisnis ritel besar lainnya
 - b. Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik di Provinsi, Kota dan Kabupaten membuat pola kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk memetakan program pemberdayaan sesuai dengan level dan kebutuhan UMKM sehingga menjadi program prioritas masing-masing *stakeholder* terkait untuk menghindari program yang sama dan adanya pemerataan program pemberdayaan untuk seluruh UMKM di Provinsi Jambi.

- c. Dinas Koperasi dan UMKM bertanggungjawab atas data base UMKM yang dapat digunakan sebagai informasi bagi stakeholder terkait untuk keberlanjutan program pemberdayaan UMKM di Provinsi Jambi
- UMKM memiliki kemampuan belajar yang rendah, maka implikasi kebijakan UMKM membentuk asosiasi usaha antar UMKM tempat melakukan *sharing knowledge* dan saling belajar antar UMKM di bawah bimbingan dan pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- Perlu membangun motivasi UMKM untuk meningkatkan penjualan pada pandemi COVID-19, untuk itu Dinas Koperasi dan UMKM bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimbau *stakeholder* terkait dalam hal ini ritel dan pedagang besar sebagai mitra hilirisasi produk-produk UMKM, mengarahkan UMKM menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditentukan mitra usaha atau pasar dan mengarahkan mitra mencari peluang pasar dengan melibatkan UMKM sebagai proses produksi.
- Bagi pemerintah Provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hendaknya menyediakan media informasi platform digital produk-produk UMKM, yang digunakan sebagai sarana informasi, promosi dan pemasaran dan menghubungkan akses ke pasar yang lebih luas untuk lebih memperkenalkan produk-produk UMKM tersebut.
- Bagi Dinas Perindag dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/ Kabupaten/Kota hendaknya melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan yang mendukung pemasaran berbasis online (*digital marketing*). Kegiatan tersebut hendaknya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk memastikan pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar. Adapun materi pelatihan berupa :
 - a. Tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti *facebook, instagram, marketplace* dan sejenisnya.
 - b. Pengenalan dan implementasi *online mobilization mix* (bauran mobilisasi *online*) meliputi *share, hype, actionable, relevant* dan *emotional*. Bauran pemasaran ini sebagai respon adanya perubahan pasar. *Eraconnected society* adalah era dimana teknologi hadir dalam setiap aktivitas manusia dan merubah kehidupan manusia termasuk merubah pasar (perilaku konsumen).
 - c. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan *packaging* (kemasan produk). Kemampuan ini mutlak diperlukan sebagai wujud respon terhadap tuntutan pasar.
 - d. Pelatihan terkait *branding* produk. Selama ini kemampuan ini relatif terabaikan, karena ada kecenderungan pelaku UMKM lebih fokus dalam kegiatan produksi.
 - e. Pelatihan terkait *self motivation* (motivasi diri) dengan menghadirkan *coaching* atau motivator yang kompeten. Kegiatan ini penting dilakukan untuk memompa dan merawat semangat pelaku UMKM serta siap menghadapi segala tantangan yang ada.

4. Kajian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD Provinsi Jambi

- Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan asas kepatutan, asas keadilan dan asas rasionalitas. Berdasarkan hasil pembahasan maka rekomendasi dalam kajian ini adalah sebagai berikut:
- Besaran tunjangan perumahan dan transportasi dibayarkan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - Besaran tunjangan perumahan dan transportasi juga memperhatikan kebijakan pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.

5. Pengembangan Lebah Madu untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :a. menggambarkan kondisi eksisting usaha budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; b. mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; c. merumuskan alternatif strategi dalam pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi; dan d. merumuskan model pengembangan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi.

Untuk mengembangkan budidaya lebah madu di Provinsi Jambi memerlukan peranan beberapa pihak untuk melakukan pekerjaan sesuai kapasitasnya, antara lain:

Pemerintah daerah:

1. Meningkatkan anggaran untuk mendukung pengembangan budidaya lebah madu melalui program-program pengembangan pada sektor-sektor terkait budidaya lebah madu, mengingat potensi pendapatan daerah yang akan diberikan dari budidaya lebah madu.
2. Kebijakan dan anggaran pemerintah harus sinergi dengan kabupaten
3. Pemerintah ikut membantu pemasaran madu local dengan menyediakan stand pada event atau kegiatan pameran
4. Pemerintah ikut membantu bibit tanaman dalam menyediakan pakan lebah, seperti Dinas Perkebunan (bibit kopi, kayu manis, karet), Dinas kehutanan (sengon, kaliandra, ekaliptus, randu)
5. Pemerintah Daerah perlu mendukung program pemberdayaan dengan melakukan penguatan terhadap kegiatan yang sudah berjalan dan memperbaiki insfrastruktur desa
6. Perlunya kajian lebih lanjut tentang penentuan lokasi yang direkomendasikan untuk budidaya lebah madu disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kab/kota
7. Pemerintah bisa meminta kerjasama perusahaan untuk memberikan keleluasaan pada pembudidaya lebah madu dalam menanam tanaman sebagai sumber pakan lebah, dan meminta perusahaan untuk tidak melakukan penyemprotan insektisida pada lokasi tanaman yang telah diperbolehkan sebagai lokasi budidaya lebah madu.

Pemerintah Kabupaten/Desa :

1. Pengembangan budidaya lebah madu dapat dijadikan program prioritas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
2. Pendampingan kegiatan atau instansi terkait
3. Bumdes bisa dimanfaatkan untuk memasarkan madu
4. Pada saat musrenbangdes dapat diusulkan kegiatan perhutanan social
5. Pemerintah desa ikut mendukung pengembangan lebah madu dengan memperbaiki infrastuktur ataupun sarana dan prasarana desa dari dana desa.
6. Menginput data kegiatan budidaya lebah madu di desanya ke tingkat kabupaten melalui BPS

Kelompok Tani :

1. Kelompok tani perlu membudidayakan tanaman bahan pakan lebah madu
2. Menjaga kualitas dan keaslian madu dan diversifikasi produk
3. Kolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas pemasaran madu
4. Sebaiknya mengetahui kondisi/aturan penebangan akasia
5. Meningkatkan kemampuan kelompok tani, mendapatkan pelatihan atau transfer teknologi budidaya dan panen mulai dari pemeliharaan, memecah koloni, mengatasi serangan hama,
6. Diberikan kemudahan untuk mengakses modal untuk membeli peralatan, gula, bibit. Dengan adanya akses modal memudahkan petani menyediakan gula, terutama pada saat

paceklik, dan juga kebutuhan untuk perluasan usaha dengan membeli/membuat stup menjadi permasalahan dana modal karena pengeluaran terbesar dalam budidaya dan pengadaannya tidak bisa ditunda.

7. Manajemen koloni. Populasi koloni sangat menentukan keberhasilan produksi madu, sebab saat ini permasalahannya banyak lokasi stup yang berjarak sangat dekat antara grup koloni milik peternak satu dengan milik peternak lainnya. Sebaiknya ada jarak antara satu peternak dengan peternak lain dalam mengambil pakan lebah, sehingga tidak menyebabkan overlap.

Masyarakat di Sekitar Lokasi Budidaya :

1. Menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran lahan yang menimbulkan asap
2. Menanam tanaman yang menjadi sumber pakan lebah pada lahan sendiri atau lahan terlantar
3. Bagi masyarakat yang berusahatani untuk tidak melakukan penyemprotan pestisida secara berlebihan agar lebah madu tidak terganggu.

Perusahaan PT. WKS:

1. Menjamin keberlangsungan produksi akasia sebagai pakan lebah madu
2. Komitmen dalam mengendalikan pemakaian pestisida dan bahan kimia
3. Mendukung kegiatan edukasi dan pelatihan kepada petani lebah madu di sekitar lahan.

6. Evaluasi Program Cetak Sawah Baru dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. mengevaluasi pelaksanaan perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi; b. menganalisis dampak perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi; dan c. menganalisis status keberlanjutan program perluasan lahan pertanian melalui cetak sawah baru di Provinsi Jambi.

Perluasan lahan dalam bentuk perluasan lahan khususnya di Provinsi Jambi menghadapi banyak kendala dan tantangan. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan petani dan *stakeholders* didapatkan hambatan sarana prasarana pendukung seperti jalan pertanian dan sarana irigasi yang tidak memadai dan alat mesin pertanian yang sangat terbatas.

Lembaga keuangan dan penyediaan sarana produksi seperti koperasi, toko sarana produksi dan peranan BULOG yang dinilai masih kurang. Kesuburan lahan yang masih kurang, kemampuan dan keterampilan petani dalam mengolah lahan yang ada tidak begitu baik karena sebagian besar petani terbiasa dengan pola usaha tani ladang dan perkebunan tidak terbiasa dengan pola usaha tani yang menetap seperti di sawah.

Selain hambatan tersebut, perluasan lahan pertanian di lokasi penelitian didukung oleh keberadaan kelompok tani sebagai wadah komunikasi dan sarana tukar menukar informasi antar petani. Penyuluh pertanian yang selalu mendampingi dan melatih petani juga dinilai bermanfaat. Motivasi tinggi petani dalam mengelola lahan hasil perluasan lahan juga dinilai sangat bagus. Petani menilai perluasan lahan dapat meningkatkan penguasaan lahan sawah yang dikelola petani. Petani dan masyarakat juga merasakan dampak langsung tambahan luas lahan yang ada karena lahan perluasan lahan baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan pangan, sebagai penyerap tenaga kerja di pedesaan maupun sebagai alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan pendapatan.

Setelah melihat kondisi lapangan, wawancara dengan responden dan *stakeholders* terkait perluasan lahan cetak sawah baru di Provinsi Jambi, alternatif kebijakan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan usaha pertanian, pembangunan/rehabilitasi sarana jaringan irigasi tersier, Drainase pembuangan air dan

irigasi sirkulasi pintu air dan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian (mesin perontok padi, traktor bajak sawah, kendaraan roda tiga) yang dapat difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi/Kab/Kota.

2. Melakukan optimasi usahatani padi sawah melalui : a) peningkatan produktivitas dengan perbaikan varietas, perbaikan teknologi budidaya dan konservasi sumber daya lahan dan air; b) peningkatan indeks pertanaman padi sawah dengan membangun dan memperluas jangkauan jaringan irigasi serta memanfaatkan sumber daya air secara optimal; dan c) peningkatan efisiensi usahatani melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal.
3. Menciptakan lapangan kerja baru baik *off farm* maupun *non farm* sebagai sumber pendapatan alternatif petani terutama pada tipologi lahan sawah setengah teknis dan pasang surut.
4. Memberikan insentif yang wajar kepada petani untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tukar petani melalui kebijakan subsidi sarana produksi, skim kredit usahatani bersubsidi yang mudah diakses, peningkatan harga gabah dan mencegah fluktuasi harga yang merugikan petani.
5. Rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dibutuhkan peran penyuluh pertanian. Peran penyuluhan antara lain sebagai penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, pendidikan dan proses rekayasa sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki peran penyuluh pertanian dalam masyarakat pedesaan dengan cara peningkatan wawasan penyuluh pertanian dan keahliannya serta mengoptimalkan sarana dan prasarana penyuluh pertanian.
Penyuluhan pertanian menjadi sangat penting dalam perannya sebagai jembatan bagi petani. Penyuluhan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya produksi, modal kerja, prasarana pokok disamping layanan umum lain yang dibutuhkan petani agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi. Sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan dan memajukan pembangunan pertanian, maka peran penyuluhan pertanian dalam makna agribisnis merupakan suatu tujuan pembangunan pertanian jangka panjang dan berkelanjutan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berorientasi pada peningkatan produksi usaha tani dan nilai tambah produksi hasil pertanian.
6. Upaya untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menuju non pertanian, sejumlah strategi yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Mencadangkan kawasan pangan yang dilindungi dari proses alih fungsi lahan dengan Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Penetapan kawasan pertanian berkelanjutan harus ditetapkan dalam RTRW kabupaten (UU No. 41/2009, pasal 18-19), sedangkan penetapan LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dalam rencana rinci/detail tata ruang (RDTR) kabupaten (UU No. 41/2009, pasal 20-21).
 - b. Membatasi luas lahan yang dapat dialihfungsikan melalui pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kawasan P2B) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) difokuskan pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi yang harus dikembangkan di dalam Kawasan P2B dan LP2B meliputi : 1. peningkatan kesuburan tanah; 2. peningkatan kualitas bibit; 3. diversifikasi tanaman pangan; 4. pencegahan dan penanggulangan HPT; 5. pengembangan irigasi; 6. pemanfaatan teknologi pertanian; 7. pengembangan inovasi pertanian; 8. penyuluhan pertanian; 9. Jaminan akses permodalan. Sedangkan program ekstensifikasi meliputi kegiatan : 1. pencetakan LP2B;

2. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan 3. Pengalihan fungsi lahan non pertanian menjadi LP2B.

Pengendalian LP2B. Aspek pengendalian dibagi atas 3 hal, yaitu insentif, disinsentif dan alih fungsi. Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kepada para petani yang lahannya masuk kategori LP2B, yaitu perbaikan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian benih dan varietas unggul, kemudahan akses informasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana produksi, bantuan penerbitan sertifikat tanah, penghargaan bagi petani berprestasi dan keringanan pajak bumi dan bangunan.

7. Kualitas Pelayanan Perizinan di Provinsi Jambi

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : a. untuk mengetahui dan memberikan gambaran tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; b. harapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; c. kekuatan hubungan antar unsur pelayanan perizinan dan aspek-aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Jambi; dan d. upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pembahasan maka implikasi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- Pelayanan perizinan membutuhkan sosialisasi yang intensif terutama sampai ke pelosok desa dan kelurahan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum mengurus izin karena ketidaktahuan. DPM-PTSP dapat bekerjasama dengan kepala desa dan kelurahan untuk kegiatan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi atau WEB pelayanan perizinan baik secara OSS maupun non OSS.
- Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan lebih memperhatikan memperhatikan kompetensi petugas pelayanan agar harapan masyarakat dapat dipenuhi oleh petugas.
- Membangun sistem integrasi dengan dinas-dinas teknis terkait untuk mempermudah masyarakat mengurus izin dengan cara membuat inovasi sistem pelayanan secara digital yang menghubungkan DPM-PTSP dengan dinas teknis terkait.
- Memperhatikan dan memperbaiki indikator pada kuadran pertama terkait dengan sistem pelayanan, proses pelayanan, kompetensi SDM yang disesuaikan dengan aturan-aturan yang mengikat DPM-PTSP dan masyarakat pengguna.